



SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BELITONG TIMUR

LAPORAN KINERJA 2025

PREPARED BY:

-  setda.beltim.go.id
-  setda@beltim.go.id
-  bapersetdabeltim@gmail.com
-  Kompleks Perkantoran Terpadu Manggarawan



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya kami telah dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta dalam penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur menuju terwujudnya *good governance* dan *clean governance* serta sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali/pemacu dalam peningkatan kinerja di lingkup Sekretariat Daerah. Kinerja tersebut diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2025.

Adapun substansi pada Laporan Kinerja ini antara lain menguraikan sasaran yang telah dicapai berdasarkan Misi Sekretariat Daerah, juga memuat deskripsi kendala dan permasalahan yang dihadapi serta alternatif penyelesaian/solusi berikut tindaklanjut yang telah dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah dalam mengatasi hambatan tersebut. Sehingga diharapkan peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja seluruh aparatur Sekretariat Daerah pada tahun-tahun mendatang. Dalam penyusunan Laporan Kinerja ini kami telah berupaya secara optimal dengan mengikuti sistematika serta berpedoman pada peraturan-peraturan diatas, namun Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur ini masih banyak kekurangan atau masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan masukan yang bersifat membangun demi sempurnanya penyusunan LKJ Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur ini sangat kami harapkan.



Akhir kata semoga Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 ini menjadi bagian dari konsistensi kami terhadap komitmen untuk selalu memperbaiki diri dan meningkatkan kinerja secara terukur dan akuntabel

Manggar, 27 Februari 2026


Sekretaris Daerah
Kabupaten Belitung Timur
ERMA MONDO, SH
NIP. 19922 199703 2 002



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	I - 1
1.1 Latar Belakang	I - 1
1.2 Dasar Hukum	I - 1
1.3 Gambaran Umum Organisasi	I - 3
1.3.1 Tugas dan Fungsi	I - 3
1.3.2 Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kab.Belitong Timur	I - 4
1.3.3 Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kab.Belitong Timur	I - 5
1.4 Kepegawaian	I - 6
1.4.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Struktur Organisasi	I - 6
1.4.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan	I - 7
1.4.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselonisasi	I - 8
1.4.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	I - 8
1.4.5 Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian	I - 9
1.5 Sarana dan Prasarana Kerja	I - 10
1.6 Ruang Lingkup	I - 10
1.7 Teknik Pengumpulan Data	I - 11
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	II - 12
2.1. Perencanaan Kinerja	II - 12
2.1.1. Rencana Strategis (Renstra Sekretariat Daerah)	II - 12
2.1.1.1 Visi dan Misi	II - 13
2.1.1.2 Tujuan dan Sasaran	II - 13
2.1.1.3 Strategi dan Kebijakan	II - 16
2.1.1.4 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Rencana Target Indikator Tahun 2025-2029	II - 17
2.1.2. Indikator Kinerja Utama	II - 21
2.1.3. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	II - 27
2.1.4. Perjanjian Kinerja	II - 29
Bab III AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN	III - 34
3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja	III - 34
3.2. Evaluasi Kinerja	III - 37
3.3. Analisis Capaian Kinerja	III - 39
3.3.1. Analisis Capaian Kinerja Sebelum Perubahan (Renstra 2021-2026)	III - 40
3.3.2. Analisis Capaian Kinerja Sebelum Perubahan (Renstra 2025-2029)	III - 47
3.4. Akuntabilitas Keuangan	III - 78
Bab IV PENUTUP	IV - 100
4.1 Kesimpulan	IV - 100
4.2 Rencana Aksi dan Upaya Perbaikan	IV - 101

LAMPIRAN

Lampiran

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Struktur Organisasi	I - 6
Tabel 1.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan	I - 7
Tabel 1.3	Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselonisasi	I - 8
Tabel 1.4	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	I - 8
Tabel 1.5	Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian	I - 9
Tabel 1.6	Jumlah Sarana dan Prasarana	I - 10
Tabel 2.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Renstra Setda dengan RPJMD.....	II - 15
Tabel 2.2	Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	II - 17
Tabel 2.3	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, dan Rencana Target Capaian Indikator Tahun 2025-2029	II - 19
Tabel 2.4	Indikator Kinerja Utama (Renstra 2021-2026)	II - 22
Tabel 2.5	Indikator Kinerja Utama (Renstra 2025-2029)	II - 25
Tabel 2.6	Rencana Kerja Tahunan (RKT).....	II - 27
Tabel 2.7	Rencana Kerja Tahunan (RKT) Perubahan	II - 29
Tabel 2.8	Perjanjian Kinerja Sebelum Perubahan (Renstra 2021-2026)	II - 30
Tabel 2.9	Perjanjian Kinerja Perubahan (Renstra 2025-2029)	II - 32
Tabel 3.1	Kategori, Nilai, dan Interpretasi atas Capaian Indikator Kinerja Sasaran	III - 34
Tabel 3.2	Target Pengukuran Kinerja Tahun 2021-2026	III - 35
Tabel 3.3	Target Pengukuran Kinerja Tahun 2025-2029	III - 37
Tabel 3.4	Evaluasi Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025	III - 38
Tabel 3.5	Evaluasi Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	III - 39
Tabel 3.6-1	Evaluasi Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 1.1.1	III - 40
Tabel 3.6-2	Evaluasi Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 1.3.1	III - 42
Tabel 3.6-3	Evaluasi Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 1.1.3	III - 44
Tabel 3.6-4	Nilai Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025	III - 45
Tabel 3.6-5	Realisasi Akumulasi Tahun 2025 dibandingkan Target Akhir RENSTRA Tahun 2026 Sasaran 1.1.3	III - 46
Tabel 3.7-1	Evaluasi Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 1.1.1	III - 48
Tabel 3.7-2	Skor dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Provinsi dan Kabupaten/Kota Kepulauan Bangka Belitung	III - 50
Tabel 3.7-3	Realisasi Akumulasi Tahun 2025 dibandingkan Target Akhir RENSTRA	



	Tahun 2025-2029 Sasaran 1.1.1-1	III – 51
Tabel 3.7-4	Rincian Nilai Kebijakan Per Indikator	III - 54
Tabel 3.7-5	Realisasi Akumulasi Tahun 2025 dibandingkan Target Akhir RENSTRA Tahun 2025-2029 Sasaran 1.1.1-2	III – 57
Tabel 3.7-6	Evaluasi Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 1.1.2	III - 59
Tabel 3.7-7	Nilai ITKP Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024-2025	III - 60
Tabel 3.7-8	Perbandingan Nilai ITKP Wilayah Prov Kep Bangka Belitung Tahun 2025	III - 60
Tabel 3.7-9	Realisasi Akumulasi Tahun 2025 dibandingkan Target Akhir RENSTRA Tahun 2025-2029 Sasaran 1.1.2.....	III – 62
Tabel 3.7-10	Evaluasi Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 1.1.3	III - 64
Tabel 3.7-11	Hasil Evaluasi SAKIP Sekretariat Daerah Tahun 2023-2025	III - 66
Tabel 3.7-12	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat pada Sekretariat Daerah TA. 2025 ..	III - 71
Tabel 3.7-13	Rencana Tindak Lanjut Pelayanan Publik	III - 73
Tabel 3.7-14	Skor Tingkat Kematangan Sekretariat Daerah Tahun 2025	III - 74
Tabel 3.7-15	Realisasi Akumulasi Tahun 2025 dibandingkan Target Akhir RENSTRA Tahun 2025-2029 Sasaran 1.1.3.....	III – 77
Tabel 3.8	Rincian Alokasi Anggaran yang Bersumber dari APBD Setda TA. 2025	III – 78
Tabel 3.9	Pagu dan Realisasi Anggaran Per Sasaran Tahun 2025.....	III – 79
Tabel 3.10	Pagu dan Realisasi Anggaran Per Program Tahun 2025.....	III – 79
Tabel 3.11	Akuntabilitas Keuangan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025	III – 80
Tabel 3.12	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025	III – 85

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah	I - 5
Gambar 1.2	Grafik Pegawai Berdasarkan Golongan	I - 7
Gambar 1.3	Grafik Pegawai Berdasarkan Eselon	I - 8
Gambar 1.4	Grafik Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	I - 9
Gambar 1.5	Grafik Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian	I - 9
Gambar 3.1.	Grafik Capaian IRH Tahun 2023-2025	III-46
Gambar 3.2	Target dan Capaian Nilai EPPD Tahun 2021-2024	III-49
Gambar 3.3	Grafik Perkembangan Nilai IKK dalam 3 (tiga) Tahun Terakhir	III-56
Gambar 3.4	Grafik Perkembangan Nilai SAKIP Setda Tahun 2023-2025	III-67
Gambar 3.5	Grafik Peningkatan Nilai IKM Sekretariat Daerah Tahun 2024-2025	III-72
Gambar 3.6	Diagram Capaian Anggaran TA 2025 berdasarkan Jenis Belanja	III-78



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) selain sebagai panduan dalam Penilaian dan Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah juga merupakan bagian kunci dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Yang terpenting dalam penyusunan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta hasil analisis yang memadai. Hal tersebut tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada setiap akhir tahun anggaran setiap instansi sudah mulai melakukan proses penyusunan Laporan Kinerja untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, dalam hal ini adalah Sekretariat Daerah.

1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No.47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);



2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah No 43) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 137);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 95);
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 Nomor 2);
11. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 49 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 137).

1.3. Gambaran Umum Organisasi

1.3.1 Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur, Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyusunan Kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.

Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur diatur dalam Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 49 Tahun 2024.

Selain itu, Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administrative terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
- d. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah;

- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.3.2 Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur

Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah, yang terdiri dari :

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas :
 1. Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
 3. Bagian Hukum, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 4. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri atas :
 1. Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
 2. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri atas:
 - Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - Kelompok Jabatan Fungsional.
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Asisten Administrasi Umum, terdiri atas :
 - a. Bagian Organisasi, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
 - b. Bagian Umum, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, terdiri atas :
 - Subbagian Protokol;
 - Kelompok Jabatan Fungsional
 - d. Bagian Perencanaan dan Keuangan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

1.4 Kepegawaian

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai Aparatur Sipil selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur memiliki sumber daya aparatur dengan rincian sebagai berikut :

1.4.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Struktur Organisasi

Tabel 1.1.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Struktur Organisasi
Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur

No	Unit Kerja	Jumlah	
		2024	2025
1	Sekretaris Daerah	1	1
2	Staf Ahli Bupati	3	3
3	Asisten	2	
4	Fungsional Tertentu	53	66
5	Bagian Kesejahteraan Rakyat	3	8
6	Bagian Tata Pemerintahan	3	8
7	Bagian Hukum	1	3
8	Bagian Perekonomian Pembangunan dan SDA	5	8
9	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	4	6
10	Bagian Organisasi	2	2
11	Bagian Umum	4	37
12	Bagian Keuangan dan Perencanaan	9	13
13	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	6	12
	JUMLAH	96	167

Sumber : Sekretariat Daerah, Desember 2025

Pada **tabel 1.1** jumlah pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah tahun 2025 sebanyak 167 (seratus enam puluh tujuh) orang terdiri dari PNS dan PPPK, yang mengalami

penambahan 71 (tujuh puluh satu) orang pegawai jika dibandingkan dengan jumlah pegawai pada tahun 2024.

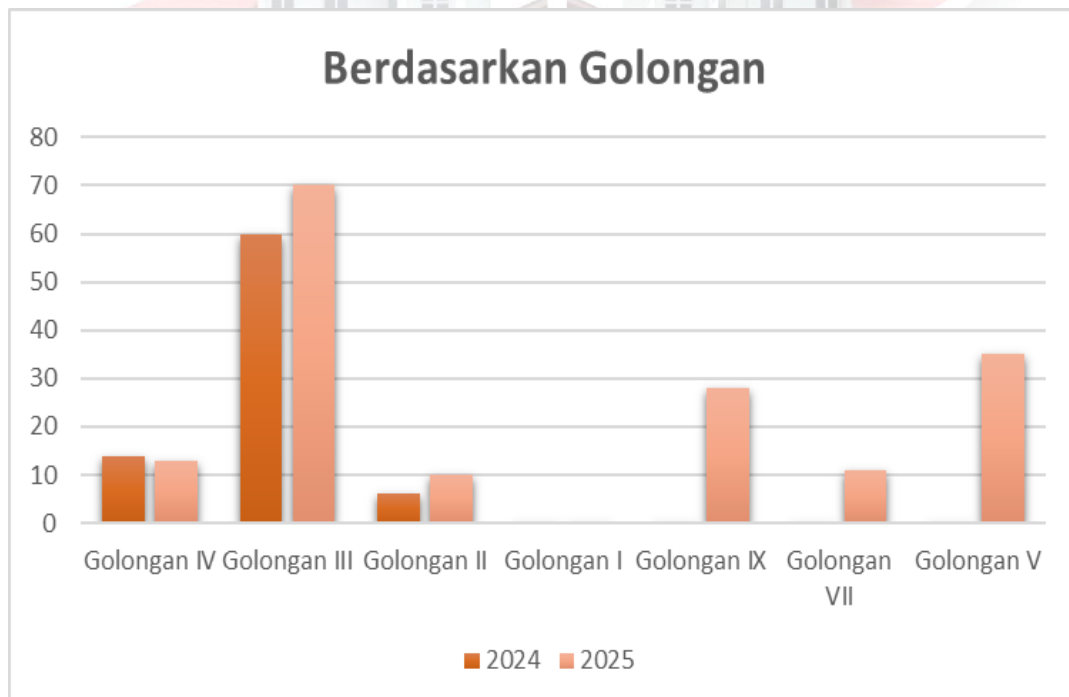
1.4.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

Tabel 1.2.

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur

No	Golongan	Jumlah	
		2024	2025
1	Golongan IV	14	13
2	Golongan III	60	70
3	Golongan II	6	10
4	Golongan I	-	-
5	Golongan IX	-	28
6	Golongan VII	-	11
7	Golongan V	-	35
	JUMLAH	80	167

Sumber: Sekretariat Daerah, Desember 2025



Gambar 1.2 Grafik Pegawai Berdasarkan Golongan

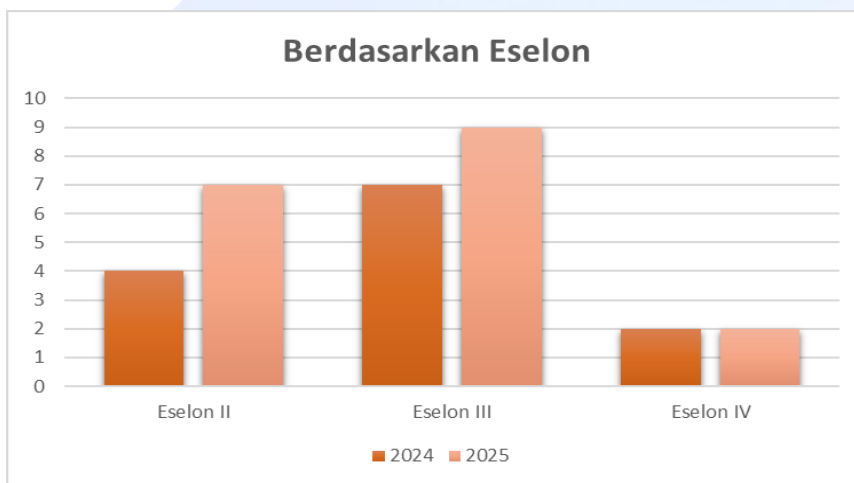
1.4.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselonisasi

Tabel 1.3.

Jumlah Pegawai berdasarkan Eselonisasi
Sekretariat Daerah Kabupaten Belitong Timur

No	Eselon	Jumlah	
		2024	2025
1	Eselon II	4	7
2	Eselon III	7	9
3	Eselon IV	2	2
JUMLAH		13	18

Sumber: Sekretariat Daerah, Desember 2025



Gambar 1.3 Grafik Pegawai Berdasarkan Eselon

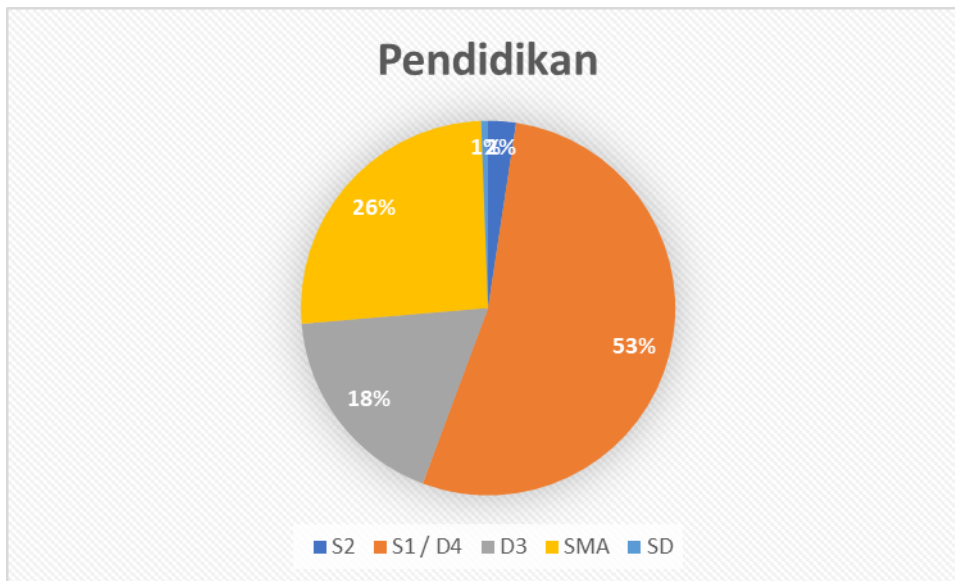
1.4.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 1.4.

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Sekretariat Daerah Kabupaten Belitong Timur

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	
		2024	2025
1	S3	-	-
2	S2	6	4
3	S1 / D4	51	89
4	D3	6	30
5	SMA	17	43
6	SMP	-	-
7	SD	-	1
JUMLAH		80	167

Sumber : Sekretariat Daerah, Desember 2025



Gambar 1.4 Grafik Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

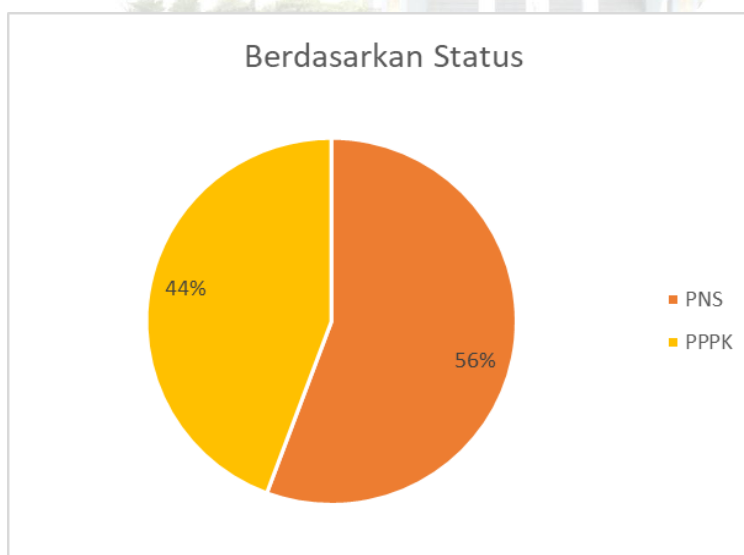
1.4.5 Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

Tabel 1.5.

Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian
Sekretariat Daerah Kabupaten Belitong Timur

No	Status Kepegawaian	Jumlah	
		2024	2025
1	PNS	80	93
2	PPPK	16	74
3	NON ASN	110	-
JUMLAH		206	167

Sumber: Bagian Umum Sekretariat Daerah, Tahun 2024



Gambar 1.5 Grafik Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

1.5 Sarana dan Prasarana Kerja

Selain Sumber Daya Aparatur, kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Belitong Timur juga didukung oleh sarana dan prasarana yang tersedia, berikut ini adalah data sarana dan prasarana pada akhir tahun 2025 :

Tabel 1.6.
Jumlah Sarana dan Prasarana
Sekretariat Daerah Kabupaten Belitong Timur

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah	
		2024	2025
1	Gedung Kantor	5	5
2	Rumah Dinas	38	38
3	Kendaraan Roda 3	3	0
4	Kendaraan Roda 4	81	63
5	Kendaraan Roda 2	48	36
6	Meja	227	223
7	Kursi	1531	1513
8	Laptop/PC	158	151
9	Scanner	15	15
10	Printer	154	150
11	Asrama	2	2
12	Mess Perwakilan	2	1
13	Videotron Indoor	1	1
14	Videotron Outdoor	1	1

Sumber: Sekretariat Daerah, Tahun 2025

1.6 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Belitong Timur Tahun 2025 adalah:

1. Rencana Kinerja, berupa Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Belitong Timur Tahun 2021-2026, Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Belitong Timur Tahun 2025-2029, Rencana Kerja Tahun 2025.
2. Perjanjian Kinerja, meliputi Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Belitong Timur Tahun 2025.
3. Pengukuran Kinerja, meliputi:
 - a. Perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja yang dicantumkan dalam lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dalam rangka pelaksanaan DPA dan DPPA Sekretariat Daerah Kabupaten Belitong Timur Tahun 2025.

- b. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029.

1.7 Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data kinerja, Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung timur menggunakan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengumpulan Data Kinerja dan Pengukuran Data Kinerja sebagai acuan (SOP Pengumpulan Data Kinerja terlampir). SOP ini dijalankan secara efektif dalam 8 hari, 5 jam, 45 menit. Namun dikarenakan ketidaksiapan bahan yang diakibatkan keterlambatan penyampaian data dari beberapa bagian pada Sekretariat Daerah, data yang masih mentah atau menunggu rilis nilai resmi dari Pemerintah Pusat, SOP tersebut menjadi kurang efektif.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Dokumen rencana kinerja memuat beberapa informasi tentang sasaran, program, kegiatan, dan indikator kinerja kegiatan.

2.1.1. Rencana Strategis (Renstra Sekretariat Daerah)

Rencana Strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan. Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur merupakan hasil dari perencanaan strategis, yaitu suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai lima tahun, yang disusun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan Tahun 2025-2029, maka Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029 juga turut berubah dengan mengacu kepada RPJMD Perubahan tersebut.

Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029 mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas

kinerja Instansi pemerintah. Rencana Strategis memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan serta cara pencapaian tujuan melalui pelaksanaan program dan kegiatan.

Sekretariat Daerah telah menyusun Rencana Strategis yang menggambarkan tujuan akhir yang hendak dicapai dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Didalamnya menjelaskan usaha-usaha untuk mencapai tujuan melalui penerapan strategi-strategi yang ditetapkan.

2.1.1.1. Visi dan Misi

Visi merupakan arah pembangunan atau didefinisikan sebagai rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (*clarity of direction*). Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah.

Visi pembangunan Kabupaten Belitong Timur Tahun 2025-2029 berdasarkan visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah :

"BELTIM NYAMAN DAN BERKEMAJUAN"

Misi dimaknai sebagai jalan/cara yang dipilih untuk mewujudkan perubahan kondisi di masa depan. Maka untuk mewujudkan pencapaian visi Belitong Timur, Sekretariat Daerah Kabupaten Belitong Timur menjalankan Misi 1 yaitu :

Mewujudkan Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Teknologi Digital dan Kepemimpinan Kolaboratif

2.1.1.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran secara operasional yang akan berjalan selaras dalam mencapai visi dan misi Bupati yang telah ditetapkan dan menjadi penghubung dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan secara tahunan dan lima tahunan, yang dituangkan dalam bentuk strategi dan arah kebijakan daerah.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur mengacu pada tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Belitung Timur 2025-2029. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur dirumuskan sebagai berikut :

1. TUJUAN

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien dan meningkatkan akuntabilitas perangkat daerah (sesuai InMendagri No 2 Tahun 2025)

2. SASARAN

- a. Meningkatnya Kualitas Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Kesejahteraan Rakyat;
- b. Meningkatnya Pelaksanaan Kualitas Kebijakan perekonomian dan pembangunan;
- c. Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum dan Akuntabilitas Kinerja.

Adapun hubungan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Renstra Sekretariat Daerah dengan RPJMD Tahun 2025-2029, disajikan pada **tabel 2.1** :

2.1.1.3. Strategi dan Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien dalam kurun 5 (lima) tahun ke depan. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan, yang akan menjadi rujukan dalam program dan kegiatan.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pada Ketentuan Umum Pasal 1 disebutkan bahwa :

- Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran
- Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap

Adapun keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah untuk melaksanakan setiap misi Renstra pada Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur dapat dilihat pada **Tabel 2.2.**

Tabel 2.2.
Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur

Tujuan		Sasaran			Strategi	Kebijakan		
1	1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien dan meningkatkan akuntabilitas perangkat daerah (sesuai InMendagri No 2 Tahun 2025)	1	1	1	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Kesejahteraan Rakyat	Penataan hasil evaluasi terhadap seluruh kebijakan daerah yang telah disusun	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
			1	1	2	Meningkatnya Pelaksanaan Kualitas Kebijakan perekonomian dan pembangunan	Pengoordinasian dan penyusunan kebijakan daerah dalam bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat, perekonomian dan pembangunan	Peningkatan Kualitas Kebijakan Daerah dengan cara optimalisasi pengoordinasian penyusunan serta pemantauan dan evaluasi kebijakan daerah serta digitalisasi proses penyusunan dan evaluasi kebijakan daerah
							Peningkatan kualitas penyusunan kebijakan daerah	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pengadaan
			1	1	3	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum dan Akuntabilitas Kinerja	Penguatan sistem digitalisasi kebijakan daerah serta peningkatan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Peningkatan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan dengan cara penataan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintahan, Fasilitasi-fasilitasi penyusunan dan evaluasi proses bisnis, standar operasional prosedur dan standar pelayanan publik
						Optimalisasi Pelayanan Administrasi Umum dan Akuntabilitas Kinerja		

Sumber : Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029

2.1.1.4. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Rencana Target Indikator Tahun 2025-2029

Pelaksanaan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran sangat berpengaruh pada pelaksanaan Program dan Kegiatan yang akan dibiayai oleh APBD yang harus dievaluasi sesuai dengan capaian yang ada berdasarkan target yang telah ditetapkan.

Indikator sasaran yang dimiliki oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur merupakan Indikator Kinerja Utama yang disusun secara teknis berdasarkan

pelaksanaan program kegiatan yang ada, didalam pelaksanaan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan. Ada 7 Indikator Sasaran yang menjadi dasar Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Belitong Timur didalam penentuan target pada seluruh indikator yang ada.

Selain itu keterkaitan Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, dan Rencana Target Capaian Indikator Tahun 2025-2029 untuk melaksanakan setiap Rencana Target Capaian Indikator Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Belitong Timur dapat dilihat pada **Tabel 2.3**.





Tabel 2.3.
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, dan Rencana Target Capaian Indikator Tahun 2025-2026

NO.	MISI	TUJUAN		SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Data Capaian pada tahun awal perencanaan 2024	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan				
							2025	2026	2027	2028	2029					
1	Mewujudkan inovasi tata kelola pemerintahan berbasis teknologi digital dan kepemimpinan kolaboratif	1	1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien dan meningkatkan akuntabilitas perangkat daerah (sesuai InMendagri No 2 Tahun 2025)	1	1	1	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Kesejahteraan Rakyat	Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Sedang : 3.14	Sedang : 3.25	Sedang : 3.3	Sedang : 3.35	Sedang : 3.375	Tinggi : 3.41	Tinggi : 3.45
								Indeks Kualitas Kebijakan	Kurang : 48.39	50.1 (Cukup)	53.00 (Cukup)	55.00 (Cukup)	57.00 (Cukup)	61.00 (Cukup)	65.1 (Baik)	
					1	1	2	Meningkatnya Pelaksanaan Kualitas Kebijakan perekonomian dan pembangunan	Indeks Tata Kelola Pengadaan	84.97 (Baik)	86.76 (Baik)	86.9 (Baik)	88.29 (Baik)	88.335 (Baik)	89.68 (Baik)	
			1	1	3	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum dan Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	70.11 (BB)	71 (BB)	71.5 (BB)	72 (BB)	72.5 (BB)	73 (BB)	74 (BB)		



Laporan Kinerja
Sekretariat Daerah Kabupaten Belitong Timur Tahun 2025

NO.	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Data Capaian pada tahun awal perencanaan 2024	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan
				Indeks Kepuasan Masyarakat	78.42 (Baik)	79 (Baik)	80 (Baik)	82 (Baik)	84 (Baik)	86 (Baik)	88.31 (Sangat Baik)
				Indeks Kematangan Perangkat Daerah	37.75	37.75	38.00	38.00	39.00	39.00	40.00
				Indeks Profesionalisme ASN	79.03	80	80	71	78	78	81

Sumber : Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Belitong Timur Tahun 2025-2029



2.1.2. Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur

Indikator Kinerja Utama disusun sebagai acuan atau tolok ukur kinerja dari suatu instansi didalam menyelenggarakan program kegiatan. Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/MENPAN/11/2008, Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. IKU pada unit organisasi sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (*output*) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya masing-masing.

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicators*) secara formal dalam suatu lembaga pemerintah, diharapkan akan diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta diperolehnya ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Indikator kinerja yang baik dan cukup memadai, setidaknya-tidaknya memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Spesifik
- b. Dapat dicapai
- c. Relevan
- d. Menggambarkan sesuatu yang diukur
- e. Dapat dikuantifikasi dan diukur

Indikator Kinerja Utama ditetapkan sebagai dasar untuk penentuan besaran target kinerja, sehingga memudahkan melakukan evaluasi di dalam pelaksanaan seluruh program kegiatan pada pelaksanaan APBD. Berdasarkan hal tersebut diatas serta mengacu pada RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2026 dan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2026, serta perubahan IKU yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029 dan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029, maka Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur telah menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagaimana disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.4
INDIKATOR KINERJA UTAMA (RENSTRA 2021-2026)
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITONG TIMUR

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Rumus Penghitungan (IKU)	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya Kapasitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1.1 Meningkatkan Kualitas Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Kesejahteraan Rakyat	1.1.1 Nilai LPPD	$KPPD = [(CKM + CKUP) \times 0,75] + [PKM \times 0,25]$ Ket : - KPPD = Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah - CKM = Capaian Kinerja Makro. - CKUP = Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan - PKM = Perubahan Kinerja Makro	Hasil Penilaian dari Kementerian Dalam Negeri	Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama Sekretariat Daerah
		1.2 Meningkatkan Kualitas Kebijakan serta Fasilitasi Pembinaan Keagamaan dan kesejahteraan rakyat	1.2.1 Persentase Kebijakan dan Pembinaan Keagamaan yang difasilitasi	Jumlah kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang direalisasikan / Jumlah Rancangan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat x 100 %	Laporan Pelaksanaan Kegiatan	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
		1.3 Meningkatkan Kualitas Kebijakan terkait Reformasi hukum Daerah	1.3.1 Indeks Kualitas Kebijakan	$n = \sqrt{N} + 1$ Keterangan : n = jumlah sampel kebijakan yang dinilai N= jumlah kebijakan yang telah masuk menjadi populasi pengukuran	Hasil Penilaian dari LAN RI	Bagian Hukum Sekretariat Daerah



Laporan Kinerja
Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Rumus Penghitungan (IKU)	Sumber Data	Penanggung Jawab
			1.3.2 Indeks Reformasi Hukum	<p style="text-align: center;">FORMULA NILAI APRESIASI PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA/PEMDA TAHUN 2023: Hasil Akhir Nilai IRH</p> $f(x) = Xo + (Xmax - Xo) . 80\%$ <p style="font-size: small;">Dimana : f(x) = Nilai akhir IRH Xo = Nilai awal instansi Xmax = Nilai maximum tujuan Koefisien pengali = 0,8 (80%)</p>	Hasil Penilaian dari KemenhumHAM	Bagian Hukum Sekretariat Daerah
2	Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	2.1 Meningkatnya Pelaksanaan Kualitas Kebijakan perekonomian dan pembangunan	2.1.1 Persentase Peningkatan Kualitas Kebijakan perekonomian dan pembangunan	Rekomendasi kebijakan yang dirumuskan / Rekomendasi kebijakan yang ditetapkan x 100%	Hasil Penilaian dari LKPP	Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah
			2.1.2 9 Variabel Kematangan UKPBJ	Verifikasi dokumen bukti dukung yang disampaikan pada Sistem Informasi Model Kematangan UKPBJ (SIMKU) pada domain : Proses, Kelembagaan, SDM dan Sistem Informasi	Hasil Penilaian dari LKPP	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah
3	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	3.1 Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja	3.1.1 Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP = (Perencanaan Kinerja x Bobot 30) + (Pengukuran Kinerja x Bobot 30) + (Pelaporan Kinerja x Bobot 15) + (Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal x Bobot 25)	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Bagian Keuangan Perencanaan Sekretariat Daerah



No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Rumus Penghitungan (IKU)	Sumber Data	Penanggung Jawab
			3.1.2 Indeks Kepuasan Layanan Penunjang	untuk menghitung Indeks Kepuasan Masyarakat dilakukan melalui Survei menggunakan kuesioner yang memiliki bobot nilai. $IKM = (\text{Nilai Rata-rata Tertimbang} \times \text{Nilai Dasar})$	Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
		3.2 Meningkatnya kualitas penyusunan kebijakan kelembagaan dan pelayanan pimpinan aparatur yang efektif	3.2.1 Persentase kebijakan pelayanan pimpinan dan aparatur yg lebih efektif	Jumlah Realisasi Penyusunan kebijakan lembaga dan pelayanan pimpinan aparatur yang efektif terhadap integritas dan profesionalitas aparatur / target yang direncanakan x 100%	Laporan Pelaksanaan Kegiatan	Bagian Prokompim Sekretariat Daerah
			3.2.2 Persentase kebijakan organisasi dan kelembagaan yang efektif	Jumlah Realisasi Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Pelayanan Publik & Tata Laksana, Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi, dan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik & Tata Laksana/target yang direncanakan x 100%	Laporan Pelaksanaan Kegiatan	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah

Sumber : Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Belitang Timur Tahun 2021-2026 & RPJMD 2021-2026



Tabel 2.5
INDIKATOR KINERJA UTAMA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITONG TIMUR

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Rumus Penghitungan (IKU)	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien dan meningkatkan akuntabilitas perangkat daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	1.1 Meningkatkan Kualitas Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Kesejahteraan Rakyat	1.1.1 Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	$KPPD = [(CKM + CKUP) \times 0,75] + [PKM \times 0,25]$ Ket : - KPPD = Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah - CKM = Capaian Kinerja Makro. - CKUP = Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan - PKM = Perubahan Kinerja Makro	Hasil Penilaian dari Kementerian Dalam Negeri	Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama Sekretariat Daerah
				1.1.2 Indeks Kualitas Kebijakan	$n = \sqrt{N} + 1$ Keterangan : n = jumlah sampel kebijakan yang dinilai N= jumlah kebijakan yang telah masuk menjadi populasi pengukuran	Hasil Penilaian dari LAN RI	Bagian Hukum Sekretariat Daerah
			1.2 Meningkatkan Pelaksanaan Kualitas Kebijakan perekonomian dan pembangunan	1.2.1 Indeks Tata Kelola Pengadaan	$ITKP = [30\% \text{ Nilai Pemanfaatan Sistem Pengadaan}] + [30\% \text{ Nilai Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ}] + [40\% \text{ Nilai Kematangan UKPBJ} = (\text{SiRUP} + \text{e-Tendering} + \text{e-Purchasing} = \text{non e-Tendering dan non e-Purchasing} + \text{e-Kontrak}) + \text{Kualifikasi dan Kompetensi SDM} + \text{Tingkat Kematangan UKPBJ}]$	Hasil Penilaian dari LKPP	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah



Laporan Kinerja
Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Rumus Penghitungan (IKU)	Sumber Data	Penanggung Jawab
			1.3 Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum dan Akuntabilitas Kinerja	1.3.1 Nilai SAKIP Perangkat Daerah	$\text{Nilai SAKIP} = (\text{Perencanaan Kinerja} \times \text{Bobot } 30) + (\text{Pengukuran Kinerja} \times \text{Bobot } 30) + (\text{Pelaporan Kinerja} \times \text{Bobot } 15) + (\text{Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal} \times \text{Bobot } 25)$	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Bagian Keuangan Perencanaan Sekretariat Daerah
				1.3.2 Indeks Kepuasan Masyarakat	<p>untuk menghitung Indeks Kepuasan Masyarakat dilakukan melalui Survei menggunakan kuesioner yang memiliki bobot nilai.</p> $\text{IKM} = (\text{Nilai Rata-rata Tertimbang} \times \text{Nilai Dasar})$	Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
				1.3.3 Indeks Kematangan Perangkat Daerah	<p>analisis tingkat kematangan dilakukan dengan memberikan skor pada setiap indikator kematangan PD. Berdasarkan rekapitulasi jumlah skor yg diperoleh maka PD dapat dikelompokkan pada tingkat kematangannya</p>	Laporan Penilaian Tingkat Kematangan Perangkat Daerah	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
				1.3.4 Indeks Profesionalisme ASN	<p>Rumus Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN yaitu jumlah total hasil perkalian dari bobot indikator dikalikan nilai masing-masing jawaban indikator. Pengukuran Indeks Profesionalisme ASN menggunakan rumus sebagai berikut :</p> $\text{IP ASN} = (\text{Skor Kualifikasi} \times \text{Bobot Kualifikasi}) + (\text{Skor Kompetensi} \times \text{Bobot Kompetensi}) + (\text{Skor Kinerja} \times \text{Bobot Kinerja}) + (\text{Skor Disiplin} \times \text{Bobot Disiplin})$	Laporan Hasil Indeks Profesionalisme ASN Sekretariat Daerah	Bagian Umum Sekretariat Daerah

Sumber : Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029 & RPJMD 2025-2029

2.1.3. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Sebelum Indikator Kinerja ditetapkan dalam Penetapan Kinerja yang selalu ditandatangani oleh Kepala OPD dilingkungan Pemerintah Daerah, terdapat proses perencanaan yang harus disusun sesuai dengan rencana capaian dari pelaksanaan program kegiatan. Proses perencanaan untuk indikator kinerja adalah Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang disusun oleh OPD sebagai bagian dari kontrak kinerja dari Kepala OPD. Rencana Kinerja Tahunan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.6

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) 2025
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Sasaran Strategis							Indikator Sasaran	Satuan	Rencana Target Tahun 2025	
Sasaran Renstra PD				Sasaran RPJMD						
1	1	1	Meningkatnya Kualitas Kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah	1	1	1	Meningkatnya kapasitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah	Nilai LPPD	Status	Sangat Tinggi (3.41)
1	1	2	Meningkatnya Kualitas Kebijakan serta Fasilitasi Pembinaan Keagamaan dan kesejahteraan rakyat					Persentase Kebijakan dan Pembinaan Keagamaan yang difasilitasi	Persen	100%
1	1	3	Meningkatnya Kualitas Kebijakan terkait Reformasi hukum Daerah					Indeks Kualitas Kebijakan Baik	Status	Baik : 65
								Indeks Reformasi Hukum Baik	Status	Istimewa : 99,58
1	2	1	Meningkatnya Pelaksanaan Kualitas Kebijakan perekonomian dan pembangunan	1	2	1	Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Peningkatan Kualitas Kebijakan perekonomian dan pembangunan	Persen	100%

Sasaran Strategis							Indikator Sasaran	Satuan	Rencana Target Tahun 2025
Sasaran Renstra PD			Sasaran RPJMD						
1	2	2	Memenuhi kondisi Kematangan UKPBJ yang belum tercapai serta Memperbaiki/ Meningkatkan kondisi kematangan UKPBJ yang telah tercapai dengan menjalankan Fungsi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PBJ				9 Variabel Kematangan UKPBJ	Variabel	9/9
1	3	1	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja	1	3	1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Predikat	B >60-70
							Indeks Kepuasan Layanan Penunjang	Nilai	76,61 - 88,30 : B
1	3	2	Meningkatnya kualitas penyusunan kebijakan kelembagaan dan pelayanan pimpinan aparatur yang efektif				Persentase kebijakan pelayanan pimpinan dan aparatur yg lebih efektif	Persen	100%
							Persentase kebijakan organisasi dan kelembagaan yang efektif	Persen	100%

Sumber : Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2026 & RPJMD 2021-2026

Tabel 2.7

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) PERUBAHAN 2025
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITONG TIMUR

Sasaran Strategis							Indikator Sasaran	Satuan	Rencana Target Tahun 2025	
Sasaran Renstra PD				Sasaran RPJMD						
1	1	1	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Kesejahteraan Rakyat	1	1	1	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan	Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai	Sedang : 3.25
								Indeks Kualitas Kebijakan	Nilai	50.1 (Cukup)
1	1	2	Meningkatnya Pelaksanaan Kualitas Kebijakan perekonomian dan pembangunan					Indeks Tata Kelola Pengadaan	Nilai	86.76 (Baik)
1	1	3	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum dan Akuntabilitas Kinerja					Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	71 (BB)
								Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	79 (Baik)
								Indeks Kematangan Perangkat Daerah	Nilai	37.75
								Indeks Profesionalisme ASN	Nilai	80

Sumber : Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Belitong Timur Tahun 2025-2029 & RPJMD 2025-2029

2.1.4. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja berisikan perjanjian untuk mewujudkan target kinerja sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, pencapaian target kinerja menjadi tanggungjawab Kepala OPD, dan perjanjian tersebut diawasi oleh Kepala Daerah untuk diperlukan dalam melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari penyelenggaraan instansi yang dipimpin.

Hakekat Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya

yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Perjanjian Kinerja mendorong terlaksananya pengukuran kinerja untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan. Perjanjian Kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil – hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya.

Format penyusunan dokumen perjanjian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen perjanjian kinerja terdiri dari pernyataan perjanjian kinerja dan lampiran perjanjian kinerja. Perjanjian Kinerja memuat program yang dilaksanakan, sasaran strategis yang akan dicapai, serta anggaran yang tersedia sesuai dengan dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2025. Review atau perubahan terhadap perjanjian kinerja akan dilakukan guna penyesuaian dengan perubahan DPA Tahun Anggaran 2025.

Dokumen perjanjian kinerja dan perjanjian kinerja perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur tahun 2025 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.8
PERJANJIAN KINERJA SEBELUM PERUBAHAN (RENSTRA 2021-2026)
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
TA 2025

Sasaran Strategis							Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Tahun 2025	
Sasaran Renstra PD				Sasaran RPJMD yang diacu						
1	1	1	Meningkatnya Kualitas Kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah	1	1	1	Meningkatnya kapasitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi	1. Nilai LPPD	Status	Sangat Tinggi

Sasaran Strategis						Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Tahun 2025		
Sasaran Renstra PD			Sasaran RPJMD yang diacu							
1	1	2	Meningkatnya Kualitas Kebijakan serta Fasilitas Pembinaan Keagamaan dan kesejahteraan rakyat			pelaksanaan pembangunan daerah	1. Persentase Kebijakan dan Pembinaan Keagamaan yang difasilitasi	Persen	100%	
1	1	3	Meningkatnya Kualitas Kebijakan terkait Reformasi hukum Daerah				1. Indeks Kualitas Kebijakan Baik	Status	Baik	
							2. Indeks Reformasi Hukum Baik	Status	Istimewa	
1	2	1	Meningkatnya Pelaksanaan Kualitas Kebijakan perekonomian dan pembangunan	1	2	1	Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Persentase Peningkatan Kualitas Kebijakan perekonomian dan pembangunan	Persen	100%
1	2	2	Memenuhi kondisi Kematangan UKPBJ yang belum tercapai serta Memperbaiki/ Meningkatkan kondisi kematangan UKPBJ yang telah tercapai dengan menjalankan Fungsi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PBJ					1. 9 Variabel Kematangan UKPBJ	Variabel	9/9
1	3	1	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja	1	3	1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	1. Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	B >60-70
								2. Indeks Kepuasan Layanan Penunjang	Nilai	76,61 - 88,30 : B
1	3	2	Meningkatnya kualitas penyusunan kebijakan kelembagaan dan pelayanan pimpinan aparatur yang efektif					1. Persentase kebijakan pelayanan pimpinan dan aparatur yg lebih efektif	Persen	100%
								2. Persentase kebijakan organisasi dan kelembagaan yang efektif	Persen	100%



No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp. 10.150.987.600,-	APBD
2.	Perekonomian dan Pembangunan	Rp. 1.182.694.000,-	APBD
3.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 35.659.027.892,-	APBD

Sumber : Dokumen Perjanjian Kinerja Setda Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025

Tabel 2.9
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN (RENSTRA 2025-2029)
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
TAHUN 2025

Tujuan Renstra PD	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis								Indikator Sasaran	Satuan	Rencana Target Tahun 2025	
		Sasaran Renstra PD				Sasaran RPJMD yang diacu							
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien dan meningkatkan akuntabilitas perangkat daerah (sesuai InMendagri No 2 Tahun 2025)	Indeks Reformasi Birokrasi										Nilai	A (82.58)	
		1	1	1	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Kesejahteraan Rakyat	1	1	1	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan	Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai	Sedang : 3.25	
											Indeks Kualitas Kebijakan	Nilai	50.1 (Cukup)
		1	1	2	Meningkatnya Pelaksanaan Kualitas Kebijakan perekonomian dan pembangunan					Indeks Tata Kelola Pengadaan	Nilai	86.76 (Baik)	
		1	1	3	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum dan Akuntabilitas Kinerja					Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	71 (BB)	
										Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	79 (Baik)	
										Indeks Kematangan Perangkat Daerah	Nilai	37.75	
										Indeks Profesionalisme ASN	Nilai	80	

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp. 9.637.854.100	APBD-P
2.	Perekonomian dan Pembangunan	Rp. 596.640.700	APBD-P
3.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 27.626.093.665	APBD-P

Sumber : Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Setda Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 masih mengacu pada Renstra dan RPJMD tahun 2021-2026, sedangkan pada Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 sudah mengacu pada Renstra dan RPJMD tahun 2025-2029 sehingga ada perubahan pada tujuan, sasaran, indikator serta target kinerja.

Rencana Aksi Pencapaian Target Kinerja Indikator Utama pada Dokumen Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur tahun 2025 dapat dilihat pada **Lampiran 1**.



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN

3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja

Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dilaksanakan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang lebih menjamin adanya keseimbangan dan wujud nyata akuntabilitas kepada masyarakat, selain itu juga menunjukkan upaya pertanggungjawaban sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah.

Pencapaian sasaran diperoleh melalui kerangka pengukuran kinerja dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah.

Untuk mempermudah interpretasi atas capaian indikator sasaran diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut, yaitu : Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, dengan skala nilai peringkat kinerja dapat dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1.

Kategori, Nilai, dan Interpretasi Atas Capaian Indikator Kinerja Sasaran

No	Kategori	Nilai	Interpretasi
1	AA	>85-100	Memuaskan
2	A	>75-85	Sangat Baik
3	B	>65-75	Baik
4	CC	>50-65	Cukup Baik
5	C	>30-50	Agak Kurang
6	D	>0	Kurang

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis capaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Secara umum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur merupakan perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Belitung Timur. Dalam Renstra 2021-2026 telah ditetapkan 7 sasaran yang terdiri dari 10 indikator sasaran, dengan rincian sebagai berikut :

Sasaran 1.1.1 terdiri dari 1 indikator

Sasaran 1.1.2 terdiri dari 1 indikator

Sasaran 1.1.3 terdiri dari 2 indikator

Sasaran 1.2.1 terdiri dari 1 indikator

Sasaran 1.2.2 terdiri dari 1 indikator

Sasaran 1.3.1 terdiri dari 2 indikator

Sasaran 1.3.2 terdiri dari 2 indikator

Secara terinci capaian sasaran terlihat seperti pada tabel 3.2 Pengukuran Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 sesuai dengan Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2021-2026.

Tabel 3.2

**TARGET PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2021-2026
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Target
1	Meningkatnya Kualitas Kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah	1. Nilai LPPD	Status	Sangat Tinggi (ST) : 4,21
2	Meningkatnya Kualitas Kebijakan serta Fasilitasi Pembinaan Keagamaan dan kesejahteraan rakyat	1. Persentase Kebijakan dan Pembinaan Keagamaan yang difasilitasi	Persen	100
3	Meningkatnya Kualitas Kebijakan terkait Reformasi hukum Daerah	1. Indeks Kualitas Kebijakan Baik	Status	Baik : 65
		2. Indeks Reformasi Hukum Baik	Status	Istimewa : 99,58

Sasaran		Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Target
4	Meningkatnya Pelaksanaan Kualitas Kebijakan perekonomian dan pembangunan	1. Persentase Peningkatan Kualitas Kebijakan perekonomian dan pembangunan	Persen	100
5	Memenuhi kondisi Kematangan UKPBJ yang belum tercapai serta Memperbaiki/ Meningkatkan kondisi kematangan UKPBJ yang telah tercapai dengan menjalankan Fungsi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PBJ	1. 9 Variabel Kematangan UKPBJ	Variabel	9/9
6	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja	1. Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	B >60-70
		2. Indeks Kepuasan Layanan Penunjang	Nilai	76,61 - 88,30 : B
7	Meningkatnya kualitas penyusunan kebijakan kelembagaan dan pelayanan pimpinan aparatur yang efektif	1. Persentase kebijakan pelayanan pimpinan dan aparatur yg lebih efektif	Persen	100
		2. Persentase kebijakan organisasi dan kelembagaan yang efektif	Persen	100

Renstra dan IKU Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur telah dilakukan perubahan seiring dengan penetapan RPJMD Kabupaten Belitung Timur tahun 2025-2029. Dalam Rencana Strategis 2025-2029 telah ditetapkan 3 sasaran yang terdiri dari 7 indikator sasaran, dengan rincian sebagai berikut :

Sasaran 1.1.1 terdiri dari 2 indikator

Sasaran 1.1.2 terdiri dari 1 indikator

Sasaran 1.1.3 terdiri dari 4 indikator

Secara terinci capaian sasaran terlihat seperti pada tabel 3.3 Pengukuran Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 sesuai dengan Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029.

Tabel 3.3

**TARGET PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025-2029
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Target
1. Meningkatnya Kualitas Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Kesejahteraan Rakyat	1. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai	Sedang : 3.25
	2. Indeks Kualitas Kebijakan	Nilai	50.1 (Cukup)
2. Meningkatnya Pelaksanaan Kualitas Kebijakan perekonomian dan pembangunan	1. Indeks Tata Kelola Pengadaan	Nilai	86.76 (Baik)
3. Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum dan Akuntabilitas Kinerja	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	71 (BB)
	2. Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	79 (Baik)
	3. Indeks Kematangan Perangkat Daerah	Nilai	37.75
	4. Indeks Profesionalisme ASN	Nilai	80

3.2. Evaluasi Kinerja

Evaluasi pencapaian kinerja yang dimaksud dalam laporan ini adalah evaluasi internal yaitu penilaian secara mandiri oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur terhadap hasil pengukuran indikator kinerja sasaran.

Dalam evaluasi ini juga diuraikan hal-hal yang mendukung keberhasilan sekaligus hal-hal yang menghambat sehingga menimbulkan kegagalan pencapaian target. Diupayakan pula menginventarisir langkah-langkah antisipatif yang akan dilakukan sehingga kinerja pemerintah semakin baik pada masa-masa yang akan datang.

Evaluasi kinerja pada Tahun 2025 dilaksanakan 2 (dua) kali yaitu berdasarkan perjanjian kinerja sebelum perubahan yang mengacu pada Renstra tahun 2021-2026, serta perjanjian kinerja perubahan yang mengacu pada Renstra tahun 2025-2029.

Secara rinci persentase capaian indikator sasaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur dapat dilihat pada sebagai berikut :

Tabel 3.4
EVALUASI KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
BERDASARKAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Meningkatnya Kualitas Kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah	1. Nilai LPPD	Status	Sangat Tinggi (3.41)	Sedang (3.14)	92.08%
2	Meningkatnya Kualitas Kebijakan serta Fasilitas Pembinaan Keagamaan dan kesejahteraan rakyat	1. Persentase Kebijakan dan Pembinaan Keagamaan yang difasilitasi	Persen	100%	Indikator ini telah disesuaikan pada PK perubahan sesuai dengan Rekomendasi LHE SAKIP 2024	
3	Meningkatnya Kualitas Kebijakan terkait Reformasi hukum Daerah	1. Indeks Kualitas Kebijakan	Status	Baik : 65	Sangat Baik : 83.17	127.95%
		2. Indeks Reformasi Hukum	Status	Istimewa (AA) : 99.58	Istimewa (AA) : 99.4	99.82%
4	Meningkatnya Pelaksanaan Kualitas Kebijakan perekonomian dan pembangunan	1. Persentase Peningkatan Kualitas Kebijakan perekonomian dan pembangunan	Persen	100%	Indikator ini telah disesuaikan pada PK perubahan sesuai dengan Rekomendasi LHE SAKIP 2024	
5	Memenuhi kondisi Kematangan UKPBJ yang belum tercapai serta Memperbaiki/ Meningkatkan kondisi kematangan UKPBJ yang telah tercapai dengan menjalankan Fungsi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PBJ	1. 9 Variabel Kematangan UKPBJ	Variabel	9/9	Indikator ini telah disesuaikan pada PK perubahan sesuai dengan Rekomendasi LHE SAKIP 2024	
6	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja	1. Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	B >60-70	B : 66.85	100%
		2. Indeks Kepuasan Layanan Penunjang	Nilai	76.61 - 88.30 : B	telah dilakukan simplikasi/penggabungan SKM pada PD yang telah memiliki lebih dari 1 jenis survei	
7	Meningkatnya kualitas penyusunan kebijakan kelembagaan dan pelayanan pimpinan aparatur yang efektif	1. Persentase kebijakan pelayanan pimpinan dan aparatur yg lebih efektif	Persen	100%	Indikator ini telah disesuaikan pada PK perubahan sesuai dengan Rekomendasi LHE 2024	
		2. Persentase kebijakan organisasi dan kelembagaan yang efektif	Persen	100%		

Tabel 3.5
EVALUASI KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
BERDASARKAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja(%)
1. Meningkatkan Kualitas Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Kesejahteraan Rakyat	1. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai	Sedang : 3.25	Sedang : 3.14	96.62%
	2. Indeks Kualitas Kebijakan	Nilai	50.1 (Cukup)	Sangat Baik (83.17)	166.01%
2. Meningkatkan Pelaksanaan Kualitas Kebijakan perekonomian dan pembangunan	1. Indeks Tata Kelola Pengadaan	Nilai	86.76 (Baik)	88.49 (Baik)	101.99%
3. Meningkatkan Pelayanan Administrasi Umum dan Akuntabilitas Kinerja	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	71 (BB)	66.85 (B)	94.15%
	2. Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	79 (Baik)	85.65 (Baik)	108.42%
	3. Indeks Kematangan Perangkat Daerah	Nilai	37.75	39.00	103.31%
	4. Indeks Profesionalisme ASN	Nilai	80	80.64	100.80%

3.3 Analisis Capaian Kinerja

Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 berdasarkan data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan organisasi pembuat keputusan, agar dapat menginterpretasikan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan/Sub Kegiatan, banyak faktor-faktor yang menjadi permasalahan dan perlu adanya solusi pemecahan masalah. Untuk itu diperlukan analisis terhadap hasil pengukuran pencapaian sasaran.

Analisis atas pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2025, sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang ditetapkan oleh Bupati Belitung Timur berupa Dokumen Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, Indikator Kinerja Utama dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tentang prioritas dan sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2025 serta dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, secara umum Pemerintah Kabupaten Belitung Timur

telah dapat melaksanakan tugas dengan baik dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran tersebut.

Dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja secara umum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur tahun 2025 dapat dikemukakan bahwa sebagian besar sasaran strategis yang telah ditargetkan dapat dicapai, namun demikian masih terdapat sasaran strategis yang belum mencapai target yang diharapkan dengan berbagai kendala. Sebagian besar sasaran dan indikator yang ada pada Perjanjian Kinerja sebelum perubahan yang mengacu pada Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2021-2026 telah disesuaikan berdasarkan tindak lanjut hasil rekomendasi evaluasi SAKIP Tahun 2024 pada Perjanjian Kinerja perubahan sesuai dengan Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029. Berdasarkan hasil Analisis Pencapaian Target terhadap masing-masing sasaran secara rinci dapat diperoleh gambaran sebagai berikut:

3.3.1. Analisis Capaian Kinerja Sebelum Perubahan (Renstra 2021-2026)

Sasaran 1.1.1 :

Meningkatnya Kualitas Kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 1.1.1 : Meningkatkan Kualitas Kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan Indikator Sasaran Nilai LPPD dengan target "Sangat Tinggi". Lebih rinci mengenai hasil analisis pengukuran capaian kinerja sasaran ini disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.6-1

Evaluasi Pengukuran Capaian Kinerja

Sasaran 1.1.1 : Meningkatkan Kualitas Kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Nilai LPPD	Status	Sangat Tinggi (ST) : 4,21	Sedang (3,1724)	75	Sangat Tinggi (ST) : 3.41	Sedang (3.14)	92.08%

Capaian Indikator Nilai LPPD dengan nilai 3.14 jika dibandingkan dengan target pada Perjanjian Kinerja sebelum perubahan "Sangat Tinggi" yaitu sebesar 92.08%.

Pada Renstra 2025-2029 serta Perjanjian Kinerja Perubahan adanya penyesuaian indikator yang semula menggunakan Nilai LPPD menjadi Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD). Namun pada hakikatnya indikator tersebut merujuk pada nilai yang sama, karena nilai EPPD menggunakan LPPD yang disampaikan oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai sumber informasi utama, sehingga penjelasan lebih lanjut mengenai indikator tersebut dituangkan pada poin 3.3.2 pada narasi sasaran 1.1.1 Meningkatnya Kualitas Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Kesejahteraan Rakyat.

Sasaran	Indikator
1.1.2 Meningkatnya Kualitas Kebijakan serta Fasilitas Pembinaan Keagamaan dan kesejahteraan rakyat	Persentase Kebijakan dan Pembinaan Keagamaan yang difasilitasi
1.2.1 Meningkatnya Pelaksanaan Kualitas Kebijakan perekonomian dan pembangunan	Persentase Peningkatan Kualitas Kebijakan perekonomian dan pembangunan
1.3.2 Meningkatnya kualitas penyusunan kebijakan kelembagaan dan pelayanan pimpinan aparatur yang efektif	1) Persentase kebijakan pelayanan pimpinan dan aparatur yg lebih efektif 2) Persentase kebijakan organisasi dan kelembagaan yang efektif

Sesuai dengan hasil rekomendasi evaluasi SAKIP tahun 2024, seluruh Kebijakan yang menjadi objek pengukuran kualitas kebijakan yang ditetapkan di bidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerja sama, perekonomian, BUMD, BLUD, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa, dan sumber daya alam dilaksanakan melalui validasi akhir Tim Nasional IKK dan Board Member Meeting IKK terhadap hasil *self assessment* kebijakan yang menjadi objek pengukuran IKK oleh Lembaga Administrasi Negara melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah sebagai *leading sector*.

Sasaran 1.2.2:

Memenuhi kondisi Kematangan UKPBJ yang belum tercapai serta Memperbaiki/ Meningkatkan kondisi kematangan UKPBJ yang telah tercapai dengan menjalankan Fungsi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PBJ

Sasaran 1.2.2 : Memenuhi kondisi Kematangan UKPBJ yang belum tercapai serta Memperbaiki/ Meningkatkan kondisi kematangan UKPBJ yang telah tercapai dengan menjalankan Fungsi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PBJ dengan Indikator Sasaran 9 Variabel Kematangan UKPBJ, telah mengalami penyesuaian pada Perjanjian Kinerja Perubahan. Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) merupakan salah satu indikator untuk mengukur pencapaian Indeks Tata Kelola Pengadaan, sehingga penjelasan terkait indikator tersebut lebih lanjut dituangkan pada poin 3.3.2 pada indikator sasaran 1.1.2 Indeks Tata Kelola Pengadaan.

Sasaran 1.3.1 :

Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 1.3.1 : Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja dengan 2 (dua) Indikator Sasaran yaitu : Nilai AKIP Perangkat Daerah dengan target predikat B>60-70 serta Indeks Kepuasan Layanan Penunjang dengan target nilai Baik. Lebih rinci mengenai hasil analisis pengukuran capaian kinerja sasaran ini disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.6-2
Evaluasi Pengukuran Capaian Kinerja

Sasaran 1.3.1 : Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	B >60-70	BB (70,11)	100%	B >60-70	B (66.85)	100%
2	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang	Nilai	76,61 - 88,30 : B	B : 78,42	100%	76,61 - 88,30 : B	telah dilakukan simplikasi/penggabungan SKM pada PD yang telah memiliki lebih dari 1 jenis survei	

Pada Tahun 2025 berdasarkan LHE AKIP Tahun 2024 Sekretariat Daerah mendapatkan nilai 66.85 dengan predikat B, sesuai dengan target Renstra 2021-2026 capaian kinerja indikator tersebut telah memenuhi target dengan nilai 100%. Pada Renstra 2025-2029 indikator Nilai AKIP Perangkat Daerah ini menjadi indikator sasaran 1.1.3 dan mengalami penyesuaian target semula B>60-70 menjadi BB>70-80, hal ini dikarenakan selama 2(dua) tahun berturut-turut Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur mendapatkan predikat BB.

Indeks Kepuasan Layanan Penunjang dimaksud dapat diperoleh Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur dengan melakukan **survei** kepada penerima layanan Bagian Umum (Bupati, Wakil Bupati, ASN, tenaga kontrak, masyarakat, instansi vertikal, organisasi masyarakat dan lain-lain) terhadap pelayanan yang diberikan, seperti layanan pinjam pakai kendaraan dinas, pemakaian ruangan/gedung, penyediaan makanan dan minuman tamu, penyiapan sarana dan prasarana penyelenggaraan kegiatan Pemerintah Daerah. Indikator Indeks Kepuasan Layanan Penunjang pada semester II Tahun 2025 telah dilakukan simplikasi/penggabungan survei kepuasan Masyarakat pada perangkat daerah yang memiliki lebih dari 1 (satu) jenis survei, hal ini dikarenakan terdapat beberapa layanan yang diukur melalui SKM pada Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur. Penjelasan lebih lanjut mengenai 2 (dua) indikator tersebut dituangkan pada poin 3.3.2 pada narasi sasaran 1.1.3 Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum dan Akuntabilitas Kinerja.

Sasaran 1.1.3:

Meningkatnya Kualitas Kebijakan terkait Reformasi hukum Daerah

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 1.1.3 : Meningkatnya Kualitas Kebijakan terkait Reformasi hukum Daerah dengan 2 (dua) Indikator Sasaran, yaitu Indeks Kualitas Kebijakan dengan target "Baik" serta Indeks Reformasi Hukum dengan target "Istimewa", namun untuk indikator Indeks Kualitas Kebijakan masih menjadi indikator sasaran pada Renstra 2025-2029, sehingga penjelasan terkait indikator tersebut akan dijelaskan lebih lanjut pada analisis capaian setelah perubahan. Lebih rinci mengenai hasil analisis pengukuran capaian kinerja sasaran ini disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.6-3
Evaluasi Pengukuran Capaian Kinerja

Sasaran 1.1.3 : Meningkatnya Kualitas Kebijakan terkait Reformasi Hukum Daerah

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1.	Indeks Reformasi Hukum	Nilai	Baik : 80	Istimewa (AA) : 99.58	124%	Istimewa (AA) : 99.58	Istimewa (AA) : 99.4	99.82%

Adapun penjelasan mengenai indikator yang mewakili pencapaian kinerja sasaran tersebut, sebagai berikut :

a. Penjelasan

Indeks Reformasi Hukum (IRH) merupakan salah satu indikator dari 26 (dua puluh enam) indikator keberhasilan atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi khususnya pada level Meso yaitu "birokrasi yang bersih dan akuntabel". Instrumen Indeks Reformasi Hukum digunakan dalam rangka memperkuat koordinasi untuk melakukan harmonisasi regulasi dan mendorong reregulasi/ deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reuiu, selain itu digunakan pula dalam rangka mendorong penyederhanaan regulasi pada setiap jenjang level peraturan perundang-undangan. Tujuan penilaian ini adalah untuk menilai pelaksanaan reformasi hukum dalam rangka mewujudkan birokrasi yang kapabel sesuai sasaran road map reformasi birokrasi tahun 2020-2024. Selain itu, penilaian ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi hukum pada Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Sesuai dengan hasil penilaian atas Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025 dari Badan Strategi Kebijakan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia Nomor : PPH-OT.03.01-293 Tanggal 13 Oktober 2025, telah disimpulkan hasil Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 adalah **99.40** dengan Kategori **AA (ISTIMEWA)**. Adapun rincian hasil penilaian adalah sebagai berikut :

Hasil Penilaian atas Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025

No	Variabel dan Indikator	Bobot	Nilai
1.	Tingkat koordinasi Kementerian Hukum an HAM untuk melakukan harmonisasi regulasi/Memperkuat koordinasi untuk melakukan harmonisasi regulasi	25	25
2.	Kompetensi perancang peraturan perundang-undangan (legal drafter) yang berkualitas	25	25
3.	Kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reuiu	30	30
4.	Penataan Database Peraturan Perundang-undangan	20	17
Nilai Total Penilaian Indeks Reformasi Hukum		100	97

Pada tahun Penilaian 2025 Kementerian Hukum Leading Institutional IRH di level meso memberikan Apresiasi kepada seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dengan Formula sebagai berikut:

**FORMULA NILAI APRESIASI
PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA/PEMDA**

Hasil Akhir Nilai IRH

$$f(x) = X_o + (X_{max} - X_o) \cdot 80\%$$

Dimana :
f(x) = Nilai akhir IRH
X_o = Nilai awal instansi
X_{max} = Nilai maximum tujuan
Koefisien pengali = 0,8 (80%)

Dari formula di atas, hasil nilai Indeks Reformasi Hukum sebagai berikut:

Tabel 3.6-4
Nilai Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025

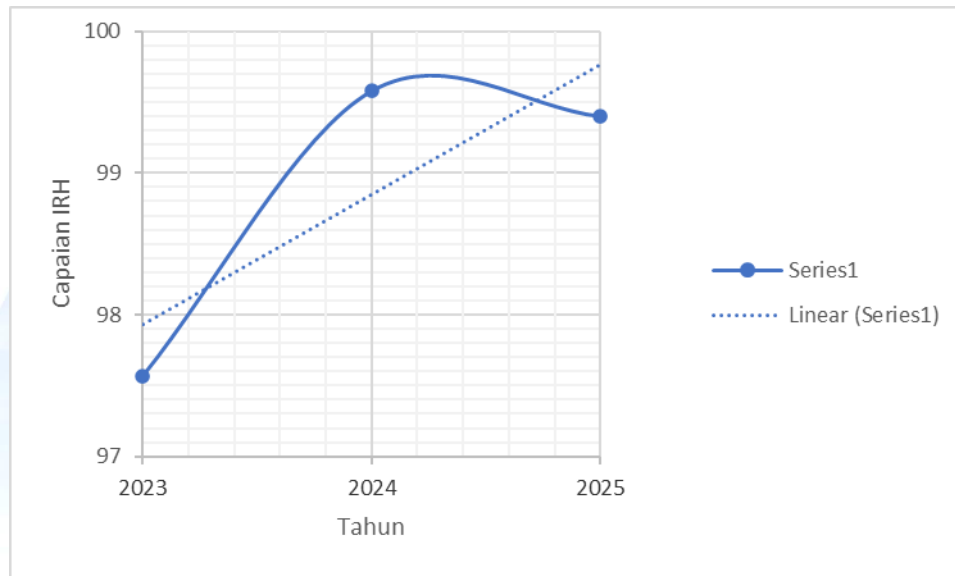
No	Penilaian	Nilai
1	Nilai Awal	97.00
2	Nilai Apresiasi	2.40
3	Nilai Akhir	99.40

Target indikator Indeks Reformasi Hukum pada tahun 2025 sebesar 99.58 jika dibandingkan dengan realisasi kinerja sebesar 99.40 maka capaian kinerjanya sebesar 99.82%.

b. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja

Capaian kinerja indikator Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 0,18 Poin dari capaian tahun sebelumnya dimana IRH Kabupaten

Belitung Timur Tahun 2025 memperoleh nilai 99,58 dengan predikat Istimewa seperti terlihat pada **Tabel 3.6-3**. Berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai Kementerian Hukum terdapat hal-hal yang masih perlu untuk diperbaiki, yakni pengelolaan JDIH mengalami penurunan dari 89 menjadi 84 yang mengakibatkan penurunan nilai pada variable IV Penataan Database Peraturan Perundang-undangan semula 20 menjadi 17. Grafik capaian IRH dalam 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



Gambar 3.1 Grafik Capaian IRH Tahun 2023-2025

c. Analisis Realisasi Kinerja dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Renstra

Apabila dilihat dari realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RENSTRA adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6-5

Realisasi Akumulasi Tahun 2025 dibandingkan Target Akhir RENSTRA Tahun 2026

Sasaran 1.1.3 : Meningkatnya Kualitas Kebijakan terkait Reformasi Hukum Daerah

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Akumulasi s/d Tahun 2025	Rencana Sesuai dengan Target RENSTRA Tahun 2026	Persentase Capaian Kinerja (%)
1	Indeks Reformasi Hukum	Nilai	Istimewa (AA) : 99,40	Baik: 80	124%

Capaian kinerja "Indeks Reformasi Hukum" tahun 2025 adalah 124% dengan kata lain telah melampaui target akhir Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2026. Pada Renstra

Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029 indikator Indeks Reformasi Hukum diturunkan menjadi indikator pada kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum.

d. Analisis keberhasilan/Kegagalan Kinerja serta Alternatif Solusi

Hasil rekomendasi dari Tim Penilai Kementerian Hukum terhadap Variabel IV Penataan Database Peraturan Perundang-undangan, yakni :

- Tingkatkan pengelolaan JDIH sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum;
- Memenuhi seluruh indikator penilaian kinerja JDIH;
- Data dukung yang disampaikan pada Variabel 4 bersifat sebagai kelengkapan administrasi dalam pengisian LKP IRH. Adapun nilai pada Variabel 4 secara langsung mengacu pada hasil evaluasi pengelolaan JDIH (e-Report) Tahun 2024

Untuk meningkatkan Nilai Indeks Reformasi Hukum pada tahun yang akan datang, rencana aksi yang akan dilakukan adalah meningkatkan pengelolaan JDIH sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019, serta menjaga koordinasi dan komunikasi yang baik antarstakeholder selama proses legal formil pembentukan peraturan perundang-undangan di Daerah.

3.3.2 Analisis Capaian Kinerja Setelah Perubahan (Renstra 2025-2029)

Sasaran 1.1.1 :

Meningkatnya Kualitas Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Kesejahteraan Rakyat

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 1.1.1 : Meningkatkan Kualitas Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Kesejahteraan Rakyat dengan 2 (dua) Indikator Sasaran, yaitu Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan target "Sedang" serta Indeks Kualitas Kebijakan dengan target "Cukup". Lebih rinci mengenai hasil analisis pengukuran capaian kinerja sasaran ini disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.7-1
Evaluasi Pengukuran Capaian Kinerja

Sasaran 1.1.1 : Meningkatnya Kualitas Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Kesejahteraan Rakyat

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai	Sangat Tinggi (ST) : 4,21	Sedang (3,1724)	75	Sedang : 3.25	Sedang : 3.14	96.62%
2	Indeks Kualitas Kebijakan	Nilai	Baik: 65	Kurang: 48,39	74%	50.1 (Cukup)	Sangat Baik (83.17)	166.01%

Adapun penjelasan mengenai indikator yang mewakili pencapaian kinerja sasaran tersebut, sebagai berikut:

1. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

a. Penjelasan

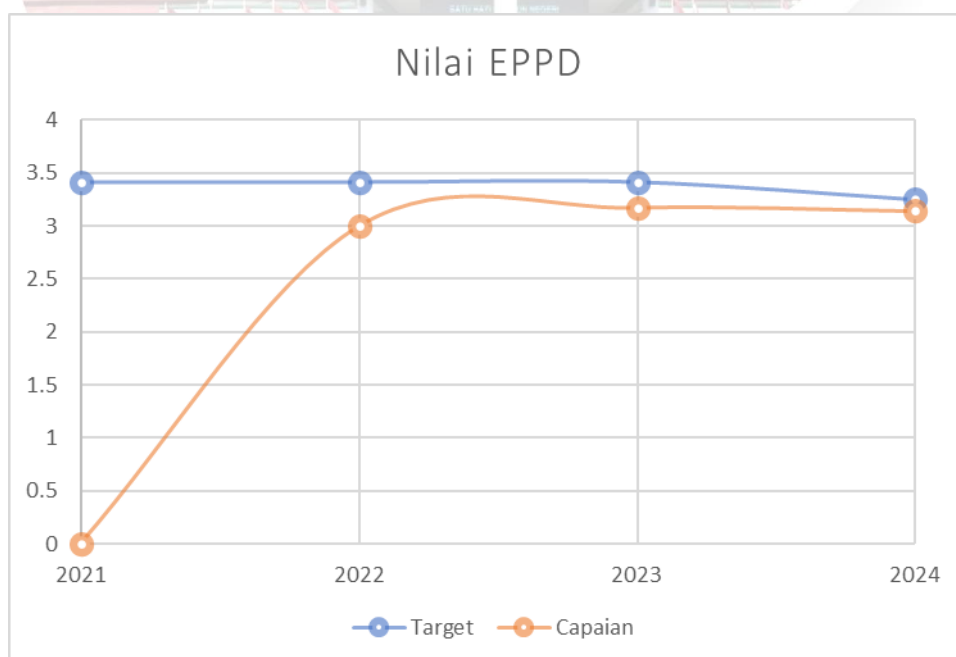
Berdasarkan ketentuan Pasal 69 dan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa kepala daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada menteri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. EPPD adalah evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam rangka penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. EPPD dilakukan untuk menilai kinerja keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah baik secara keseluruhan maupun keberhasilan pelaksanaan masing-masing urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. EPPD dilakukan setiap tahun oleh Tim Nasional dan Tim Nasional melakukan penentuan peringkat kinerja pemerintahan daerah secara nasional.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD ini dibuat dalam rangka memberikan laporan pelaksanaan dan gambaran pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan. LPPD menggambarkan

kinerja urusan yang ditangani oleh pemerintah daerah, untuk itu Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk masing-masing urusan. Pemerintah Daerah harus mengisi realisasi capaian dari masing-masing indikator yang telah ditetapkan tersebut. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 menyebutkan bahwa LPPD digunakan sebagai dasar Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat EPPD.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-2109 Tahun 2025 tentang hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintah secara nasional tahun 2024 berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota tahun 2023 yang dirilis pada tanggal 21 April 2025, nilai EPPD Kabupaten Belitung Timur mendapatkan skor 3,1406 dengan status Sedang. Pada tahun 2025 target kinerja Sedang dengan nilai 3.25, sehingga capaian kinerja pada tahun 2025 sebesar 96.62%.

b. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja



Gambar 3.2 Target dan Capaian Nilai EPPD Tahun 2021-2024

Nilai LPPD Tahun 2024 masih menunggu hasil penetapan dari Kemendagri, sehingga untuk nilai LPPD masih menggunakan capaian Tahun 2023. Adanya penurunan capaian kinerja sebesar 0,03 skor dibandingkan tahun 2023, skor kinerja pada tahun 2023 bernilai 3,1724 sedangkan pada tahun 2024 skor kinerja 3,1406.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja di Level Nasional/Internasional

Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-2109 Tahun 2025 tentang hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintah secara nasional tahun 2024 berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota tahun 2023, Kabupaten Belitung Timur menduduki urutan nomor 132 (seratus tiga puluh dua) dari 395 Kabupaten yang ada di Indonesia. Peringkat pertama diraih oleh Kabupaten Bangli dengan skor 3,7566 dengan status "Tinggi", selain itu ada 5 (lima) Kabupaten yang tidak mendapatkan nilai dikarenakan Kepala Daerah tersangkut kasus hukum, 7 (tujuh) Kabupaten yang tidak menaati peraturan perundang-undangan (tidak menyampaikan data capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan) serta 8 (delapan) Kabupaten yang tidak menaati peraturan perundang-undangan (tidak melakukan reviu terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan).

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur dengan status kinerja sedang berada pada posisi ke 6 (enam) dari 7 (tujuh) Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, hal ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.7-2
Skor dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Provinsi dan Kabupaten/Kota Kepulauan Bangka Belitung

Kode	Nama Pemerintah Daerah	Skor	Status
19.05	Kabupaten Bangka Barat	3.2863	Sedang
19.03	Kabupaten Bangka Selatan	3.2397	Sedang
19.04	Kabupaten Bangka Tengah	3.2082	Sedang
19.71	Kota Pangkal Pinang	3.2012	Sedang
19.02	Kabupaten Belitung	3.1670	Sedang
19.06	Kabupaten Belitung Timur	3.1406	Sedang
19.01	Kabupaten Bangka	3.1096	Sedang

d. Analisis Realisasi Kinerja dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Renstra

Apabila dilihat dari realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RENSTRA adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7-3
REALISASI AKUMULASI TAHUN 2025 DIBANDINGKAN TARGET AKHIR RENSTRA TAHUN 2025-2029

SASARAN : Meningkatnya Kualitas Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Kesejahteraan Rakyat

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Akumulasi s/d Tahun 2025	Rencana Sesuai dengan Renstra SKPD Tahun 2025-2029	Persentase Capaian Kinerja (%)
1	Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	Nilai	Sedang (3.1406)	Tinggi (3.45)	91.03%

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa, capaian kinerja Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Tahun 2025 jika dibandingkan dengan target Renstra 2025-2029 adalah sebesar 91.03% diperoleh dari target akhir renstra 4,21 dibandingkan dengan realisasi tahun 2025 sebesar 3,1406.

e. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja serta Alternatif Solusi

Dari proses penyusunan LPPD sampai dengan pelaksanaan EPPD yang difasilitasi oleh Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi nilai EPPD, yaitu :

- Adanya penurunan capaian kinerja baik Kinerja Makro maupun kinerja urusan Pemerintah Daerah. Terdapat 3 (tiga) IKK makro yang mengalami penurunan nilai diantaranya :
 - 1) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
TPT yaitu persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. TPT digunakan untuk mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran.

Interpretasi : TPT Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2024 sebesar 2,63 persen poin dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 2,41 persen

2) Laju Pertumbuhan PDRB

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2024 adalah sebesar -0,03 persen, terkonstraksi jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 yang tumbuh 4,70 persen. Pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi pada tahun 2024 dikarenakan permasalahan tataniaga timah yang juga berdampak pada Belitung Timur. Produksi komoditas pertambangan dan penggalian terutama biji timah mengalami penurunan serta tidak beroperasionalnya salah satu Smelter Timah berpengaruh besar terhadap menurunnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belitung Timur pada Tahun 2024

3) Gini Ratio

Permasalahan tataniaga timah mempengaruhi perekonomian di Bangka Belitung tidak terkecuali Belitung Timur sehingga berpengaruh terhadap meningkatnya Angka Gini Ratio. Meningkatnya Angka Gini Ratio Kabupaten Belitung Timur pada Tahun 2024 disebabkan karena menurunnya Rata-Rata Pengeluaran per Kapita 40 Persen Terbawah dan 40 Persen Menengah, sedangkan Rata-Rata Pengeluaran per Kapita 20 Persen Teratas meningkat, meskipun secara Total Rata-Rata Pengeluaran mengalami peningkatan

- Penyajian data kurang maksimal dan kurang lengkap

Upaya untuk meningkatkan nilai EPPD diantaranya meliputi:

- 1) Memperkuat komitmen pimpinan dan perangkat daerah dalam penyusunan LPPD sehingga Indikator Kinerja Kunci yang menjadi indikator penilaian lebih diperhatikan dalam hal perencanaan dan penganggaran.
- 2) Memperkuat komitmen perangkat daerah dalam rangka pengumpulan dan penyusunan data sehingga data yang tersaji adalah data yang berkualitas dan valid, serta data terkumpul tepat waktu.
- 3) Meningkatkan koordinasi dengan Perangkat Daerah.
- 4) Melakukan pendampingan/asistensi/bimtek kepada Perangkat Daerah dalam penyusunan LPPD.

5) Melakukan koordinasi dengan Tim Daerah (Biro Pemerintahan Provinsi dan Inspektorat) dan Kementerian Dalam Negeri.

2. Indeks Kualitas Kebijakan

a. Penjelasan

Indeks Kualitas Kebijakan/*Policy Quality Index* merupakan alat untuk mengukur kualitas kebijakan publik di Indonesia yang sederhana, efektif, dan mudah untuk digunakan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, Indeks Kualitas Kebijakan merupakan salah satu indeks yang mendukung capaian sasaran Birokrasi yang bersih dan akuntabel dan area Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan. Selain itu, tujuan IKK ialah untuk mendorong penguatan partisipasi publik dan prinsip-prinsip tata Kelola yang baik dalam proses pembuatan kebijakan publik, khususnya dalam membangun kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*).

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas PD serta pelayanan administratif. Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban menyelenggarakan fungsi terkait kebijakan, yakni pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah dan pemantauan serta evaluasi kebijakan Daerah di bidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerja sama, perekonomian, BUMD, BLUD, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa, dan sumber daya alam.

Metode sampling yang digunakan untuk menentukan jumlah kebijakan yang akan diukur dari hasil penyusunan populasi kebijakan sesuai dengan penilaian dari Lembaga Administrasi Negara, yaitu:

$$n = \sqrt{N+1}$$

Keterangan :

n = Jml sampel kebijakan yang dinilai

N= Jml kebijakan yang telah masuk menjadi populasi

pengukuran

Jika suatu instansi jumlah populasi kebijakannya kurang dari 4 (empat), maka semua kebijakan di instansi tersebut akan menjadi sampel pengukuran. Pemerintah Kabupaten Belitung Timur telah berpartisipasi dalam pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan tahun 2025 dengan objek pengukuran pada 3 (tiga) Peraturan Bupati Belitung Timur yang terpilih dalam system informasi IKK.

Kebijakan yang menjadi objek pengukuran kualitas kebijakan merupakan kebijakan yang ditetapkan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun sebelum tahun pengukuran dan telah diimplementasikan paling singkat 1 (satu) tahun dari waktu dimulainya pengukuran IKK. Rentang hasil penilaian IKK yang digunakan untuk menentukan predikat hasil penilaian IKK adalah sebagai berikut :

Nilai	Predikat
91,00 – 100	Unggul
80,00 – 90,99	Sangat Baik
65,00 – 79,99	Baik
50,00 – 64,99	Cukup
<50,00	Kurang

b. Analisis Capaian Target dan Realisasi Tahun 2025

Pada tahun 2025, Kabupaten Belitung Timur memperoleh nilai Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) instansi sebesar **83,17** dengan predikat Sangat Baik dari target indikator sebesar 50.01 dengan predikat cukup. Angka ini merupakan rerata dari tiga kebijakan yang dinilai pada tahun tersebut. Tiga regulasi itu menjadi cermin bagaimana kualitas perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan dijalankan.

Tabel 3.7-4

Rincian Nilai Kebijakan Per Indikator

No.	Nama Kebijakan	Nilai Per Indikator					Nilai Akhir
		PK	IK	EK	TP	JF	
1.	Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Stimulan Rumah Swadaya	56,25	67,5	82,5	62,5	10	72,5

No.	Nama Kebijakan	Nilai Per Indikator					Nilai Akhir
		PK	IK	EK	TP	JF	
2.	Peraturan Bupati Belitong Timur Nomor 14 Tahun 2022 tentang Bantuan Pendidikan Kepada Peserta Didik yang Berasal dari Keluarga Tidak Mampu	81.25	68.75	91.25	100	10	85,8125
3.	Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitong Timur Nomor 63 Tahun 2021 tentang Standar Satuan Harga Barang Dan Jasa Tahun Anggaran 2022	90.625	83.75	91.25	100	10	91,4375

Catatan:

PK (20%) : Perencanaan Kebijakan

IK (25%) : Implementasi Kebijakan

EK (30%) : Evaluasi dan Keberlanjutan Kebijakan

TP (15%) : Transparansi dan Partisipasi Publik

JF (10%) : Keterlibatan JF Analisis Kebijakan

- Kebijakan pertama adalah Peraturan Bupati Belitong Timur Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Stimulan Rumah Swadaya. Nilai akhirnya 72,5. Jika dibedah, perencanaan kebijakan (PK) masih di angka 56,25, implementasi (IK) 67,5, dan transparansi-partisipasi publik (TP) 62,5. Angka-angka ini menunjukkan bahwa fondasi konseptual dan keterbukaan publiknya belum optimal. Meski begitu, evaluasi dan keberlanjutan (EK) sudah 82,5, serta keterlibatan JF Analisis Kebijakan (JF) terpenuhi penuh di angka 10.
- Kebijakan kedua, Peraturan Bupati Belitong Timur Nomor 14 Tahun 2022 tentang Bantuan Pendidikan bagi Peserta Didik dari Keluarga Tidak Mampu, mencatat nilai akhir 85,8125. Di sini terlihat konsistensi yang lebih baik. Perencanaan berada di 81,25, implementasi 68,75, dan evaluasi 91,25. Transparansi dan partisipasi publik bahkan

mencapai 100. Artinya, secara prosedural dan akuntabilitas publik, kebijakan ini relatif matang.

- Kebijakan ketiga, Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2021 tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022, memperoleh nilai tertinggi: 91,4375. Hampir semua indikator berada pada spektrum tinggi, dengan perencanaan 90,625, implementasi 83,75, evaluasi 91,25, dan transparansi 100. Secara teknokratik, kebijakan ini paling solid dalam siklus kebijakan.
- Bobot penilaian menunjukkan bahwa evaluasi dan keberlanjutan kebijakan memiliki kontribusi terbesar, yaitu 30 persen, disusul implementasi 25 persen, perencanaan 20 persen, transparansi-partisipasi 15 persen, dan keterlibatan JF 10 persen. Dengan komposisi ini, wajar jika kekuatan utama Kabupaten Belitung Timur berada pada aspek evaluasi dan keberlanjutan. Dua kebijakan bahkan menunjukkan performa sangat tinggi pada transparansi, meskipun terdapat satu kebijakan dengan nilai 62,5 yang menciptakan selisih cukup lebar, 37,5 poin dari skor maksimal

c. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja

Capaian kinerja indikator Indeks Kualitas Kebijakan Tahun 2025 meningkat drastis 34.78 Poin dari capaian tahun sebelumnya dimana IKK Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 memperoleh nilai 48.39 dengan predikat kurang seperti terlihat pada **Tabel 3.7-1**. Grafik perkembangan peningkatan Nilai IKK dalam 3(tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada grafik dibawah ini :



Gambar 3.3 Grafik Perkembangan Nilai IKK dalam 3 (tiga) tahun terakhir

f. Analisis Realisasi Kinerja dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Renstra

Apabila dilihat dari realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RENSTRA adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7-5
REALISASI AKUMULASI TAHUN 2025 DIBANDINGKAN TARGET AKHIR RENSTRA TAHUN 2025-2029

SASARAN : Meningkatnya Kualitas Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Kesejahteraan Rakyat

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Akumulasi s/d Tahun 2025	Rencana Sesuai dengan Renstra SKPD Tahun 2025-2029	Persentase Capaian Kinerja (%)
1	Indeks Kualitas Kebijakan	Nilai	Sangat Baik (83.17)	Baik (65.1)	127.76%

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa, capaian kinerja Indeks Kualitas Kebijakan Tahun 2025 telah melampaui target Renstra 2025-2029 sebesar 127.76% diperoleh dari target akhir renstra 65.1 atau predikat baik dibandingkan dengan realisasi tahun 2025 sebesar 83.17 dengan predikat Sangat Baik. Hal ini dikarenakan pada saat penyusunan target Renstra 2025-2029 capaian IKK bernilai 48.39 dengan predikat kurang sehingga target yang ditentukan hanya bernilai Baik. Target tersebut akan disesuaikan pada perjanjian kinerja tahun 2026 sampai dengan seterusnya.

d. Analisis keberhasilan/Kegagalan Kinerja serta Alternatif Solusi

Kenaikan nilai Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Kabupaten Belitung Timur dari 48,39 pada periode sebelumnya menjadi 83,17 pada tahun 2025 menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Secara matematis, terjadi lonjakan sebesar 34,78 poin. Dalam konteks pengukuran kinerja kebijakan publik, selisih tersebut bukan sekadar pergeseran angka, melainkan indikasi adanya transformasi dalam tata kelola perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan di lingkungan pemerintah daerah.

Peningkatan ini mengindikasikan perbaikan sistemik pada seluruh siklus kebijakan. Dengan komposisi bobot penilaian yang menempatkan Evaluasi dan Keberlanjutan Kebijakan (30 persen) sebagai indikator terbesar, capaian tinggi pada aspek tersebut

berkontribusi kuat terhadap lonjakan nilai agregat. Artinya, kebijakan yang ditetapkan tidak lagi berhenti pada tahap normatif, tetapi telah disertai mekanisme evaluasi yang terstruktur serta keberlanjutan program yang lebih terjamin. Kondisi ini mencerminkan kematangan dalam pengelolaan kebijakan berbasis hasil dan pembelajaran kebijakan (policy learning).

Di sisi lain, peningkatan pada aspek Transparansi dan Partisipasi Publik juga memperlihatkan adanya penguatan prinsip akuntabilitas dan keterbukaan. Dua dari tiga kebijakan yang dinilai memperoleh skor maksimal pada indikator ini. Hal tersebut menunjukkan bahwa proses penyusunan kebijakan semakin inklusif dan responsif terhadap kepentingan masyarakat. Meskipun masih terdapat variasi capaian antarproduk kebijakan, secara umum tren peningkatannya memperlihatkan konsistensi perbaikan.

Perencanaan dan implementasi kebijakan pun menunjukkan kualitas yang lebih terstruktur dibandingkan periode sebelumnya. Hal ini dapat diasumsikan sebagai hasil dari penguatan fungsi perencanaan berbasis data, harmonisasi regulasi, serta meningkatnya keterlibatan Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan dalam proses perumusan kebijakan. Keterlibatan unsur profesional ini menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa kebijakan disusun dengan pendekatan analitis, bukan sekadar administratif.

Sasaran 1.1.2 :

Meningkatnya Pelaksanaan Kualitas Kebijakan perekonomian dan pembangunan

Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 1.1.2 : Meningkatkan Pelaksanaan Kualitas Kebijakan perekonomian dan pembangunan, dengan 1 (satu) Indikator Sasaran, yaitu Indeks Tata Kelola Pengadaan, dengan nilai 86.76 (Baik) sebagai Target pada Tahun 2025. Lebih rinci mengenai analisis pengukuran capaian kinerja sasaran ini disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.7-6
Evaluasi Pengukuran Capaian Kinerja

Sasaran 1.1.2 : Meningkatnya Pelaksanaan Kualitas Kebijakan perekonomian dan pembangunan

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Nilai	80.01 (Baik)	84.97 (Baik)	106.20%	86.76 (Baik)	88.49 (Baik)	101.99%

Adapun penjelasan mengenai indikator sasaran yang mewakili pencapaian kinerja sasaran tersebut, sebagai berikut:

a. Penjelasan

Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) adalah alat ukur dan indikator penilaian reformasi birokrasi yang digunakan oleh LKPP untuk mengevaluasi kualitas tata Kelola pengadaan barang/jasa pemerintah. ITKP menilai kematangan, kepatuhan serta transparansi proses pengadaan di K/L pemda. ITKP minimal **Baik** terdiri dari indikator yang mengukur tata Kelola pengadaan dalam tingkat operasional, baik dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) dan kelembagaan maupun dari segi system pengadaan yaitu sebagai berikut :

- 1) Pemanfaatan system pengadaan, yang terdiri dari :
 - SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan);
 - *E-Tendering* (Tender/Seleksi/Tender Cepat);
 - *E-Purchasing*;
 - *Non-E_Tendering & Non-E-Purchasing*; dan
 - E-Kontrak.
- 2) Kualifikasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (SDM PBJ).
- 3) Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ), indikator ITKP ini sebelumnya menjadi indikator sasaran pada Renstra Tahun 2021-2026.

Hasil Indeks Tata Kelola Pengadaan minimal Baik seluruh K/L Pemda disampaikan LKPP kepada KemenPAN-RB pada bulan November setiap tahunnya. Sesuai dengan surat dari LKPP Nomor 1550/D.2.1/01/2026 perihal Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)

Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun 2025 tanggal 21 Januari 2026, Pada tahun 2025 ITKP Kabupaten Belitung Timur mendapatkan nilai 88.49 (Baik).

b. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja

Adanya peningkatan nilai sebesar 3.52 dibandingkan dengan nilai ITKP tahun 2024 dengan nilai 84.97, hal ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.7-7
Nilai ITKP Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024-2025

No	Uraian	2024	2025
1	SIRUP	9.47	9.92
2	E-Tendering	4.42	4.75
3	Non-E-Tendering/Non-E-Purchasing	3.38	3.97
4	E-Katalog	2.12	3.03
5	Toko Daring	0.00	0.00
6	E-Kontrak	4.33	4.33
	Indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan	23.72	25.99
	Indikator Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	21.25	22.50
	Indikator Tingkat Kematangan UKPBJ	40.00	40.00
	Skor ITKP	84.97	88.49
	Predikat	Baik	Baik

Peningkatan nilai pada 2 (dua) indikator, yakni Indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan sebesar 2.27 dan Indikator Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ sebesar 1.25

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja di Level Nasional/Internasional

Tabel 3.7-8
Perbandingan Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)
Wilayah Prov Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025

No	Uraian	Kab Beltim	Kab Belitung	Kab Bangka	Kab Babar	Kab Basel	Kab Bateng	Kota Pkp	Prov Kep Babel
1	SIRUP	9.92	9.45	9.40	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
2	E-Tendering	4.75	4.86	4.98	5.00	4.61	4.56	5.00	5.00
3	Non-E-	3.97	2.87	3.38	0.00	0.00	0.00	2.95	2.71

No	Uraian	Kab Beltim	Kab Belitung	Kab Bangka	Kab Babar	Kab Basel	Kab Bateng	Kota Pkp	Prov Kep Babel
	Tendering/Non -E-Purchasing								
4	E-Katalog	3.03	2.44	0.00	0.00	0.00	2.06	2.66	2.67
5	Toko Daring	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00
6	E-Kontrak	4.33	4.68	4.10	4.12	2.03	3.93	4.57	4.52
	Indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan	25.99	24.30	21.86	20.12	17.64	20.55	26.18	25.90
	Indikator Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	22.50	11.47	21.00	25.71	18.00	19.29	26.25	22.67
	Indikator Tingkat Kematangan UKPBJ	40.00	40.00	40.00	40.00	35.56	40.00	40.00	40.00
	Skor ITKP	88.49	75.77	82.86	85.83	71.20	79.84	92.43	88.57
	Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	Baik

Berdasarkan tabel Nilai ITKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kabupaten Belitung Timur berada pada urutan ke-3 dengan nilai ITKP 88.49 predikat baik. Kota Pangkalpinang memperoleh nilai ITKP paling tinggi dengan nilai 92.43 dengan predikat Sangat Baik.

d. Analisis Realisasi Kinerja dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Renstra

Apabila dilihat dari realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RENSTRA sebagai berikut:

Tabel 3.7-9

Realisasi Akumulasi Tahun 2025 dibandingkan Target Akhir RENSTRA Tahun 2025-2029

Sasaran 1.1.2 : Meningkatkan Pelaksanaan Kualitas Kebijakan perekonomian dan pembangunan

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Akumulasi s/d Tahun 2025	Rencana Sesuai dengan Target RENSTRA Tahun 2025-2029	Persentase Capaian Kinerja (%)
1	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Nilai	88.49	89.68	99%

Berdasarkan tabel diatas capaian kinerja “Indeks Tata Kelola Pengadaan” tahun 2025 adalah sebesar 99%, yang artinya sudah hampir mencapai target akhir Renstra 2025-2029.

e. Analisis keberhasilan/Kegagalan Kinerja serta Alternatif Solusi

Pada Tahun Anggaran 2025, capaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Pemerintah Kabupaten Belitung Timur memperoleh nilai 88,49. Nilai tersebut menunjukkan bahwa tata kelola pengadaan barang/jasa telah berada pada kategori baik, dengan sistem, kelembagaan, serta sumber daya yang relatif memadai dan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Capaian ITKP tersebut merupakan akumulasi dari tiga indikator utama, yaitu:

1. Pemanfaatan Sistem Pengadaan

Indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan dengan Nilai 25,99. Capaian tersebut menunjukkan bahwa perangkat daerah telah memanfaatkan sistem pengadaan secara elektronik melalui SIRUP dan SPSE. Pengumuman RUP telah dilaksanakan, proses pemilihan penyedia melalui e-Tendering berjalan, serta pencatatan kontrak pada aplikasi e-Kontrak telah dilakukan. Namun demikian, pemanfaatan e-Purchasing melalui Katalog Elektronik masih belum optimal. Masih terdapat deviasi antara perencanaan dalam RUP dengan realisasi pengadaan pada beberapa metode pemilihan yang dipengaruhi oleh perubahan anggaran dan penyesuaian kebutuhan teknis.

Langkah perbaikan yang akan dilakukan:

- a. Penguatan reuiu perencanaan pengadaan.

- b. Optimalisasi penggunaan e-Katalog melalui monitoring berkala.
 - c. Evaluasi triwulanan terhadap kesesuaian RUP dan realisasi.
 2. Kualifikasi dan Kompetensi SDM Pengadaan

Indikator Kualifikasi dan Kompetensi SDM Pengadaan dengan Nilai 22,50. Jumlah Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa tersedia sebanyak 18 orang dari rekomendasi kebutuhan sebanyak 24 orang. Ketersediaan 18 orang JF PPBJ menunjukkan organisasi telah memiliki struktur SDM yang memadai. Namun demikian, masih terdapat kekurangan 6 pejabat fungsional yang berpotensi meningkatkan beban kerja. Upaya perbaikan yang akan diupayakan:

 - a. Pengusulan formasi dan percepatan pengangkatan Jabatan Fungsional PBJ.
 - b. Pemetaan beban kerja dan redistribusi paket pengadaan.
 - c. Pengembangan kompetensi melalui pelatihan dan sertifikasi.
 3. Tingkat Kematangan UKPBJ

Indikator Tingkat Kematangan UKPBJ dengan nilai 40. Capaian Level Proaktif menunjukkan bahwa UKPBJ Kabupaten Belitong Timur berfungsi secara terencana, terdokumentasi, dan kolaboratif. UKPBJ proaktif berorientasi pada pemenuhan kebutuhan *stakeholder*, menggunakan sistem elektronik terintegrasi, dan SDM kompeten untuk menciptakan nilai tambah. Strategi penguatan yang akan dilakukan:

 - a. Penguatan manajemen risiko pengadaan.
 - b. Pengembangan sistem monitoring berbasis data.
 - c. Penyempurnaan SOP dan dokumentasi evidence dukung.

Secara keseluruhan, capaian ITKP sebesar 88,49 menunjukkan kinerja yang baik. Area yang masih memerlukan peningkatan adalah optimalisasi pemanfaatan e-Katalog serta pemenuhan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa. Dengan langkah perbaikan yang terarah, diharapkan nilai ITKP pada tahun berikutnya dapat meningkat dan mendukung tata kelola pengadaan yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel.

Sasaran 1.1.3 :

Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum dan Akuntabilitas Kinerja

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas PD serta pelayanan administratif, bukan hanya pada internal Sekretariat Daerah namun untuk seluruh unsur penunjang urusan pemerintahan lainnya.

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada Masyarakat. Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun secara periodik.

Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 1.1.3 : Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum dan Akuntabilitas Kinerja, dengan 4 (empat) Indikator Sasaran, yaitu Nilai SAKIP Perangkat Daerah, Indeks Kepuasan Masyarakat, Indeks Kematangan Perangkat Daerah serta Indeks Profesionalisme ASN. Lebih rinci mengenai analisis pengukuran capaian kinerja sasaran ini disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.7-10
Evaluasi Pengukuran Capaian Kinerja

Sasaran 1.3.1 : Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum dan Akuntabilitas Kinerja

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	B >60-70	BB (70,11)	100%	71 (BB)	66.85 (B)	94.15%

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	76.61 : Baik	83.17 : Baik	108.56%	79 (Baik)	85.65 (Baik)	108.42%
3	Indeks Kematangan Perangkat Daerah	Nilai	37.75	39.00	103.31%	37.75	37.75	103.31%
4	Indeks Profesionalisme ASN	Nilai	-	-	-	80	80.64	100.80%

Adapun penjelasan mengenai indikator yang mewakili pencapaian kinerja sasaran tersebut, sebagai berikut :

1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah

a. Penjelasan

Nilai SAKIP Perangkat Daerah sebagai indikator untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah. Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi dengan rincian sebagai berikut :

- Evaluasi atas Perencanaan Kinerja yaitu Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
- Evaluasi atas Pengukuran Kinerja yaitu Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
- Evaluasi atas Pelaporan Kinerja yaitu Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
- Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yaitu Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja; dan
- Penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya.

Nilai tersebut diharapkan tidak hanya mendorong pencapaian output organisasi secara lebih efektif dan efisien namun juga mampu memberikan kontribusi terhadap pencapaian dampak yang telah ditetapkan. Secara berjenjang, pencapaian-pencapaian tersebut dapat membantu mewujudkan tercapainya Sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Belitong timur. Oleh karena itu, dibutuhkan Kerjasama dan dukungan dari seluruh unsur Sekretariat Daerah Kabupaten Belitong Timur secara konsisten dan berkesinambungan. Berdasarkan Tabel **3.7-10** Nilai SAKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Belitong Timur Tahun 2024 berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Inspektorat Nomor : PW.01.01/155/INPTD/LHE/AKIP2024/2025 tanggal 29 Juli 2025 memperoleh nilai **66.85**. Nilai tersebut masuk dalam kategori **"B"** dengan interpretasi **"Baik"**.

b. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja

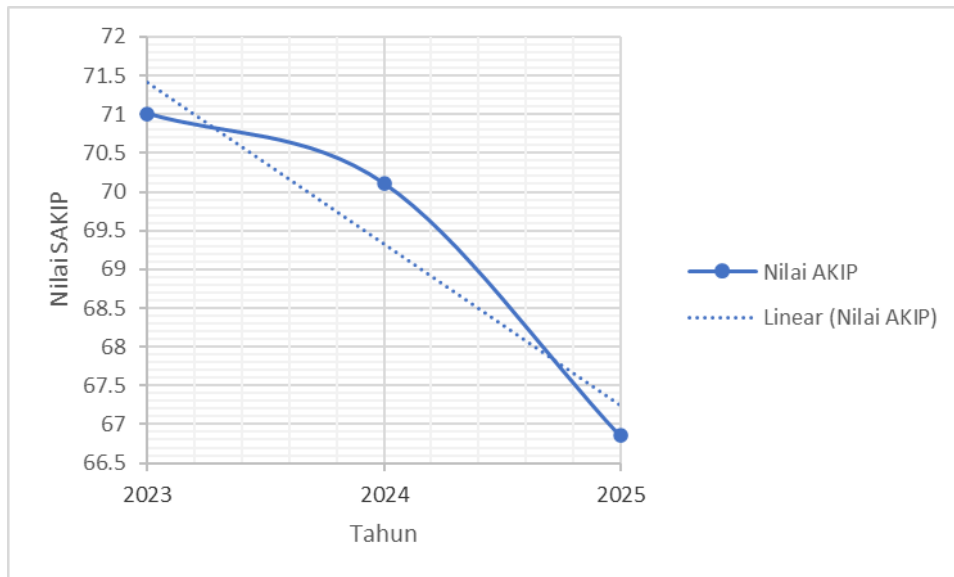
Akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi dengan rincian sebagaimana berikut :

Tabel 3.7-11

Hasil Evaluasi SAKIP Sekretariat Daerah Tahun 2023-2025

No	Komponen	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja		
			2023	2024	2025
1	Perencanaan Kinerja	30,00	22,50	23,10	19,20
2	Pengukuran Kinerja	30,00	20,10	18,60	20,40
3	Pelaporan Kinerja	15,00	8,40	9,75	10,50
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	20,00	19,25	16,75
	Nilai Hasil Evaluasi	100	71,01	70,11	66,85
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB	BB	B

Grafik perbandingan perolehan Nilai SAKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Belitong Timur dari tahun 2023-2025 dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



Gambar 3.4 Grafik Perkembangan Nilai SAKIP Setda Tahun 2023-2025

Terjadi penurunan nilai dari capaian tahun 2024 hal ini disebabkan adanya juknis terbaru dari Menpan-RB terkait evaluasi SAKIP pada perangkat daerah.

c. Analisis keberhasilan/Kegagalan Kinerja serta Alternatif Solusi

Atas hasil evaluasi pada tahun 2024, maka Sekretariat Daerah Kabupaten Belitong Timur telah menindaklanjuti rekomendasi sebagaimana berikut:

- Melakukan perbaikan pada perjanjian kinerja perubahan tahun 2025 sesuai dengan jenjang jabatan yang diselaraskan di setiap level secara logis;
- Melakukan perbaikan indikator sasaran pada perjanjian kinerja perubahan yang bersifat outcome;
- Melakukan perbaikan indikator sasaran pada penyusunan Renstra Tahun 2025-2029;
- Mengusulkan surat kepada Bappelitbangda untuk menyusun pedoman teknis pengumpulan kinerja;
- Sekretaris Daerah sepenuhnya bertanggung jawab dalam pengambilan Keputusan (Decision Maker) dalam pengukuran kinerja, sebagian rapat telah diinisiasi oleh Sekretaris Daerah;
- Sekretaris Daerah sepenuhnya bertanggungjawab menggunakan informasi dalam laporan kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja;

- Melengkapi bukti pendukung lampiran notulen capaian realisasi kinerja sampai dengan akhir tahun untuk evaluasi sakiip selanjutnya. Bukti dukung capaian realisasi kinerja setiap triwulan telah disampaikan secara lengkap pada saat evaluasi;
- Melakukan perbaikan pada Laporan Kinerja Bab III agar pengukuran kinerja disesuaikan dengan rumus pengukuran indikator dalam indikator kinerja utama untuk laporan kinerja yang akan datang;
- Melengkapi bukti pendukung tindak lanjut atas evaluasi SAKIP;
- Mengusulkan kepada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Belitung Timur untuk membuat Aplikasi Evaluasi Akip Internal.

Hal ini dilaksanakan agar penilaian Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2025 dapat memperoleh nilai yang lebih baik sesuai dengan target yang diharapkan.

2. Indeks Kepuasan Masyarakat

a. Penjelasan

Survei Kepuasan Masyarakat wajib dilaksanakan oleh setiap unit penyelenggara pelayanan publik sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Pada Renstra Tahun 2021-2026 survei kepuasan masyarakat di lingkungan Sekretariat Daerah dilaksanakan pada beberapa bagian dengan focus survei pada unsur layanan penunjang yang dilaksanakan pada bagian umum, namun dengan terbitnya Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah dan/atau Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, memungkinkan PD/UPP untuk melakukan survei secara online. Pada semester II Tahun 2025 telah dilakukan simplikasi/penggabungan SKM pada PD yang telah memiliki lebih dari 1 jenis survei. Hal tersebut menyesuaikan dengan target Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat pada dokumen Renstra 2025-2029.

Survei kepuasan Masyarakat dilakukan secara online pada Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur melalui laman terpadu survei.beltim.go.id yang difasilitasi oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Belitung Timur. Tim pelaksana survei kepuasan Masyarakat adalah bagian terkait yang ada pada Sekretariat Daerah kabupaten Belitung Timur. Berikut daftar layanan yang diukur melalui SKM pada Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur:

a. Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama

- Fasilitasi Kerja Sama Daerah
- Otonomi Daerah dan Administrasi Kewilayahan
- Penataan Administrasi Pemerintahan

b. Bagian Kesejahteraan Rakyat

- Bantuan Sosial yang tidak direncanakan
- Beasiswa Prestasi Jenjang Pendidikan Tinggi
- Hibah

c. Bagian Hukum

- Jaringan Dokumentasi dan Informasi Daerah (JDIH)
- Bantuan Hukum Masyarakat Miskin
- Penyusunan Produk Hukum
- Konsultasi dan Penyuluhan Produk Hukum

d. Bagian Perekonomian, Pembangunan dan SDA

- Fasilitasi Operasi Pasar Murah
- Pelaporan Realiasi Fisik dan Keuangan
- SIMPOR
- Aduan pendistribusian BBM dan Gas

e. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

- Konsultasi RUP (Rencana Umum Pengadaan)
- Akun non penyedia
- Registrasi & verifikasi penyedia
- Pemilihan & konsultasi pengadaan

f. Bagian Organisasi

- Fasilitasi Penyusunan Dokumen Tata Laksana & Kebijakan Yanlik PD

- Standar kompetensi
- Analisis jabatan
- Verifikasi Anjab ABK
- Info Akuntabilitas

g. Bagian Umum

- Sewa kendaraan dinas
- Ruang rapat
- Tenda
- Kursi
- Penggunaan Mess Pemkab Beltim di Jakarta dan Pangkalpinang

h. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

- Layanan Keprotokolan
- Dokumentasi dan Komunikasi Pimpinan

Nilai dihitung menggunakan nilai rata-rata terhitung masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan survei kepuasan layanan penunjang terdapat unsur-unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki nilai yang sama. Nilai penimbang ditetapkan dengan rumus :

$$\text{Bobot Nilai Rata-Rata Tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}}$$

Adapun interval mutu layanan penunjang adalah sebagai berikut :

No	Interval Nilai	Mutu Pelayanan	Kinerja Pelayanan
1	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	76,61 – 88,30	B	Baik
4	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Tahapan Survei



Sesuai dengan Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat atas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Sekretariat Daerah Kabupaten Belitong Timur Semester II Tahun 2025, Sekretariat Daerah Kabupaten Belitong Timur mendapatkan nilai rata-rata 85,65 kategori B dari jumlah responden sebanyak 314 orang, dengan rincian sebagai berikut :

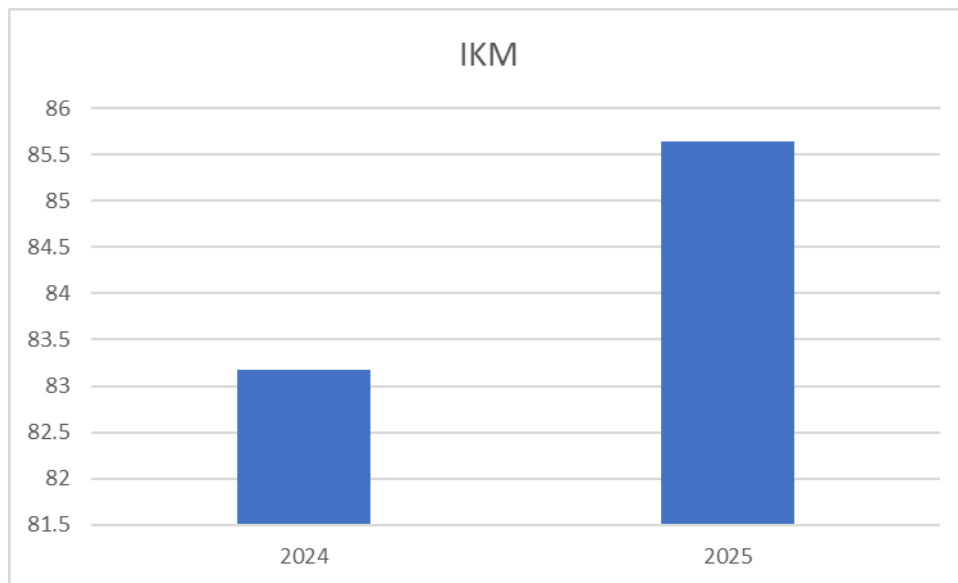
Tabel 3.7-12

Hasil Survei Kepuasan Masyarakat pada Sekretariat Daerah TA. 2025

No	Uraian	Nilai
U1	Persyaratan	83.07
U2	Prosedur	87.25
U3	Waktu	81.65
U4	Tarif / Biaya	95,57
U5	Prosedur	83.47
U6	Kompetensi	83.86
U7	Perilaku	86.08
U8	Sarpras	80.70
U9	Pengaduan	93.75
	Rata-rata Nilai	85.65
	Kategori	B

b. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja

Indeks Kepuasan Masyarakat pada Sekretariat Daerah mengalami peningkatan nilai sebesar 2.48 point dari capaian tahun 2024. Hal ini dapat dilihat pada grafik sebagai berikut:



Gambar 3.5 Grafik peningkatan nilai IKM Sekretariat Daerah Tahun 2024-2025

c. Analisis keberhasilan/Kegagalan Kinerja serta Alternatif Solusi

Hasil pengolahan data SKM menunjukkan bahwa secara keseluruhan pelayanan public di Sekretariat Daerah Kabupaten Belitong Timur berada pada kategori Baik dengan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 85.65. Terdapat tiga unsur yang menempati posisi terendah dan menjadi prioritas perbaikan, meskipun ketiganya masih dalam kategori Baik (B). Urutan nilai terendah adalah :

- Prosedur (U2) : Nilai rata-rata konversi 82.75. Meskipun berada di peringkat ketiga terendah, unsur ini menunjukkan bahwa kemudahan dan tata cara pelayanan yang diberikan sudah cukup baik, namun tetap memerlukan penyederhanaan agar lebih mudah dipahami dan dikases oleh penerima layanan;
- Waktu Pelayanan (U3) : Nilai rata-rata konversi 81.65. Responden merasa bahwa kecepatan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan masih perlu diperbaiki agar dapat selalu tepat waktu;
- Sarana dan Prasarana (U8) : Nilai rata-rata konversi terendah, 80.70. Unsur ini dinilai paling lemah dan mengindikasikan bahwa kualitas serta ketersediaan alat penunjang pelayanan perlu ditingkatkan untuk mencapai kepuasan yang lebih tinggi.

Hasil analisa tersebut dalam rangka untuk perbaikan kualitas pelayanan public maupun pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan public. Berikut rencana tindak lanjut perbaikan pada masing-masing unsur pelayanan yang memiliki nilai rendah yaitu :

Tabel 3.7-13

Rencana Tindak Lanjut Pelayanan Publik

No	Prioritas Unsur	Program / Kegiatan	2026				Penanggung Jawab
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	Prosedur	Melakukan kaji ulang dan penyederhanaan sistem, mekanisme, serta prosedur pelayanan agar lebih ringkas, mudah dipahami, dan efektif		√	√		Sekretariat Daerah
2	Waktu Pelayanan	Melakukan evaluasi dan optimalisasi terhadap standar pelayanan untuk menjamin kepastian, kecepatan, dan ketepatan waktu penyelesaian layanan	√	√	√	√	Sekretariat Daerah
3	Sarana dan Prasarana	Melakukan pemeliharaan perbaikan, dan peningkatan kualitas fasilitas fisik serta sarana pendukung pelayanan secara agar lebih memadai dan nyaman bagi pengguna layanan	√	√	√	√	Sekretariat Daerah

3. Indeks Kematangan Perangkat Daerah

a. Penjelasan

Indeks kematangan perangkat daerah adalah instrumen pengukuran tahunan berdasarkan [Permendagri No. 99 Tahun 2018](#) untuk menilai efektivitas kinerja OPD. Penilaian ini menggunakan 11 variabel sebagai berikut:

- Perencanaan Pembangunan Daerah;
- Monitoring dan Evaluasi Tugas Perangkat Daerah;
- Penjaminan Mutu Layanan Perangkat Daerah;

- SOP Perangkat Daerah;
- Pendidikan dan Pelatihan Aparatur;
- Analisis Kebijakan & Pencegahan Masalah Tugas Perangkat Daerah;
- Manajemen Sumber Daya Peralatan dan Perlengkapan Kerja yang Terukur;
- Manajemen Resiko Pelaksanaan Tugas Aparatur;
- Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah dan Aparatur;
- Pengembangan Inovasi Layanan Perangkat Daerah;
- Budaya Organisasi Perangkat Daerah.

Hasilnya mengukur kemampuan organisasi dalam pelayanan publik prima dan perbaikan system. Analisis tingkat kematangan dilakukan dengan memberikan skor pada setiap indikator kematangan PD. Berdasarkan rekapitulasi jumlah skor yg diperoleh maka PD dapat dikelompokkan pada tingkat kematangannya. Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur mendapatkan skor **39** dengan kategori tingkat kematangan "**Tinggi**".

Tabel 3.7-14

Skor Tingkat Kematangan Sekretariat Daerah Tahun 2025

No	Variabel dan Kualifikasi	Skor
1	Perencanaan Pembangunan Daerah	5
2	Monitoring dan Evaluasi Tugas Perangkat Daerah	5
3	Penjaminan Mutu Layanan Perangkat Daerah	2
4	SOP Perangkat Daerah	2
5	Pendidikan dan Pelatihan Aparatur	2
6	Analisis Kebijakan & Pencegahan Masalah Tugas Perangkat Daerah	3
7	Manajemen Sumber Daya Peralatan dan Perlengkapan Kerja yang Terukur	2
8	Manajemen Resiko Pelaksanaan Tugas Aparatur	4
9	Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah dan Aparatur	4
10	Pengembangan Inovasi Layanan Perangkat Daerah	5
11	Budaya Organisasi Perangkat Daerah.	5
	Skor	39
	Tingkat Kematangan	Tinggi

b. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja

Penilaian Indeks Kematangan Perangkat Daerah dilaksanakan setiap 2 (dua) tahun sekali, sehingga tidak ada kenaikan ataupun penurunan capaian tahun 2024-2025.

c. Analisis keberhasilan/Kegagalan Kinerja serta Alternatif Solusi

Indeks Kematangan Sekretariat Daerah berada pada kategori kematangan tingkat tinggi (37-46), hal ini dicapai berdasarkan variabel terkait perencanaan pembangunan daerah, monitoring & pengendalian tugas PD, manajemen resiko, pengukuran kinerja, pengembangan inovasi layanan dan budaya organisasi yang mencapai tingkat 4 dan 5 pada tiap variable.

Meskipun berada pada tingkat kematangan tinggi, namun masih terdapat kekurangan pada variabel manajemen sumber daya peralatan dan perlengkapan kerja yang belum terukur, kebutuhan pendidikan dan pelatihan yg belum dipetakan pada seluruh jabatan, serta belum ada penjaminan mutu dan belum ada evaluasi SOP.

Secara skor setda sudah mencapai skor tinggi, namun secara tingkatan variabel belum maksimal, sehingga perlu dilakukan:

- 1) Penjaminan mutu secara berkala, terstandar dan didukung oleh teknologi informasi berbasis internet untuk produk/proses layanan
- 2) Melakukan evaluasi/revisi pada SOP dan didukung oleh teknologi berbasis internet untuk memuat keluhan pengguna layanan
- 3) Menyusun dan memetakan kebutuhan diklat untuk seluruh jabatan dan dilakukan evaluasi regular berdasarkan rencana kebutuhan.

4. Indeks Profesionalisme ASN

a. Penjelasan

Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) berdasarkan PermenPAN RB Nomor 38 Tahun 2018 adalah instrumen pengukuran kuantitatif untuk menilai kualitas ASN berdasarkan 4 dimensi pengukuran :

- Kualifikasi (25%) : Tingkat Pendidikan formal;
- Kompetensi (40%) : Riwayat pengembangan kompetensi/pelatihan;
- Kinerja (30%) : Penilaian kinerja individu dan perilaku;
- Disiplin (5%) : kepatuhan terhadap peraturan dan hukuman disiplin.

Tahapan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN terdiri dari :

- Persiapan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN;
- Pelaksanaan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN;

- Pengolahan data Indeks Profesionalitas ASN;
- Penyusunan Laporan Indeks Profesionalitas ASN.

Berdasarkan hasil perhitungan IP ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut :

- Nilai 91-100 berkategori Sangat Tinggi;
- Nilai 81-90 berkategori Tinggi;
- Nilai 71-80 berkategori Sedang;
- Nilai 61-70 berkategori Rendah;;
- Nilai 0-60 berkategori Sangat Rendah.

Pada tahun 2025 capaian IP ASN Sekretariat Daerah 80.64 dengan kategori sedang.

b. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja

Capaian IP ASN Sekretariat Daerah Tahun 2025 pada kategori "Sedang" merupakan langkah awal yang positif dalam penerapan pengukuran profesionalitas ASN. Sebagai tahun pertama pengukuran, hasil ini menjadi baseline yang penting untuk perbaikan berkelanjutan.

c. Analisis keberhasilan/Kegagalan Kinerja serta Alternatif Solusi

Melalui penguatan sistem pengembangan kompetensi, penataan manajemen talenta, peningkatan kualitas data, serta komitmen pimpinan dan seluruh ASN, diharapkan pada tahun berikutnya capaian IP ASN dapat meningkat ke kategori "Tinggi", sehingga mendukung terwujudnya birokrasi yang profesional, akuntabel, dan berdaya saing.

5. Analisis Realisasi Kinerja dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Renstra

Apabila dilihat dari realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RENSTRA adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7-15

Realisasi Akumulasi Tahun 2025 dibandingkan Target Akhir RENSTRA Tahun 2025-2029

Sasaran 1.1.3 : Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum dan Akuntabilitas Kinerja

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Akumulasi s/d Tahun 2025	Rencana Sesuai dengan Renstra SKPD Tahun 2025-2029	Persentase Capaian Kinerja (%)
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	66.85 (B)	73 (BB)	91.58%
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	85.65 (Baik)	86 (Baik)	99.59%
3	Indeks Kematangan Perangkat Daerah	Nilai	39.00	39	100%
4	Indeks Profesionalisme ASN	Nilai	80.64	78	103%

Berdasarkan tabel diatas, realisasi akumulasi dari indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah telah mencapai target 91.58%, Indeks Kepuasan Masyarakat dengan capaian 99.59%, Indeks Kematangan Perangkat Daerah telah mencapai 100% dan Indeks Profesionalisme ASN telah melampaui target sebesar 103% jika dibandingkan dengan target Renstra 2025-2029. Dari keseluruhan target sasaran Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum dan Akuntabilitas Kinerja pada Sekretariat Daerah hampir mencapai target akhir Renstra 2025-2029 yang direncanakan.

3.4. Akuntabilitas Keuangan

Pada tahun 2025 rencana kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitong Timur dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Belitong Timur sebesar Rp. 46.748.279.192,00 akan tetapi pada saat Anggaran perubahan menjadi **Rp. 38.621.850.465.00** hal ini disebabkan karena adanya efisiensi anggaran sesuai dengan Instruksi Bupati Belitong Timur Nomor : KU.01/1/INS/BUPATI/2025 tentang Penyesuaian (*Refocusing*) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Dari anggaran perubahan yang telah ditetapkan terealisasi sebesar Rp. **35.805.670.492.00** atau **92.71%** terjadi efisiensi penggunaan anggaran sebesar **7.29%**.

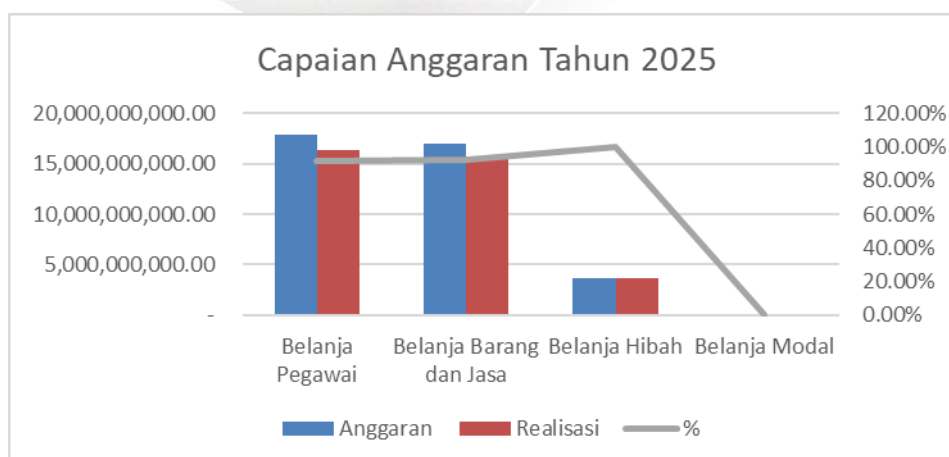
Rincian alokasi anggaran yang bersumber dari APBD-P Kabupaten Belitong Timur seperti pada **tabel 3.8** sebagai berikut:

Tabel 3.8
Rincian Alokasi Anggaran yang Bersumber dari APBD
Sekretariat Daerah Tahun 2025

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Capaian	Efisiensi
1.	Belanja Operasi	38,621,850,465.00	35,805,670,492.00	92.71%	7.29%
	a. Belanja Pegawai	17,906,497,615.00	16,395,100,993.00	91.56%	8.44%
	b. Belanja Barang dan Jasa	17,035,352,850.00	15,730,569,499.00	92.34%	7.66%
	c. Belanja Hibah	3,680,000,000.00	3,680,000,000.00	100.00%	0.00%
2.	Belanja Modal	-	-	0.00%	100.00%
	a. Belanja Modal	-	-	0.00%	100.00%
Total		38,621,850,465.00	35,805,670,492.00	92.71%	7.29%

Gambar 3.6

Diagram Capaian Anggaran TA 2025 berdasarkan Jenis Belanja



Alokasi anggaran untuk pencapaian 3 (tiga) sasaran strategis yang ditetapkan sebesar Rp. 38.621.850.465,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 35,808,175,273.00 dengan persentase penyerapan sebesar 92,71%. Dengan rincian masing-masing pagu dan realisasi anggaran pada tabel berikut :

Tabel 3.9

Pagu dan Realisasi Anggaran Per Sasaran Tahun 2025

Kode Sasaran	Sasaran	Jml Prog	Jml Keg	Input (Rp)			
				Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	% Keuangan	% Efisiensi
1 1 1	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Kesejahteraan Rakyat	1	4	10,399,116,100.00	10,008,742,686.00	96.25	3.75
1 1 2	Meningkatnya Pelaksanaan Kualitas Kebijakan perekonomian dan pembangunan	1	4	596,640,700.00	426,591,860.00	71.50	28.50
1 1 3	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum dan Akuntabilitas Kinerja	1	12	27,626,093,665.00	25,372,840,727.00	91.84	8.16
3 SASARAN		3	20	38,621,850,465.00	35,808,175,273.00	92.71	7.29

Tabel 3.10

Pagu dan Realisasi Anggaran Per Program Tahun 2025

Program/Kegiatan/sub kegiatan	Input (Rp)			
	Target (DPA)	Target (DPPA)	Realisasi	%
1 Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	10,150,987,600.00	10,399,116,100.00	10,008,742,686.00	96.25
2 Program Perekonomian dan Pembangunan	1,182,694,000.00	596,640,700.00	426,591,860.00	71.50
3 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	35,659,027,892.00	27,626,093,665.00	25,372,840,727.00	91.84
3 Program	46,992,709,492.00	38,621,850,465.00	35,808,175,273.00	92.71



Capaian anggaran dari masing-masing kegiatan dan program untuk pencapaian sasaran strategis seperti tabel 3.11 berikut:

Tabel 3.11
Akuntabilitas Keuangan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025

Kode Sasaran	Sasaran	Program/Kegiatan/sub kegiatan	Input (Rp)				
			Target (DPA)	Target (DPPA)	Realisasi	%	
1	1	1	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Kesejahteraan Rakyat	10,150,987,600.00	10,399,116,100.00	10,008,742,686.00	96.25
		1	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	236,326,400.00	117,049,000.00	109,098,614.00	93.21
		1	Administrasi Tata Pemerintahan	236,326,400.00	117,049,000.00	109,098,614.00	93.21
		1	Penataan Administrasi Pemerintahan	193,456,400.00	98,761,000.00	92,016,614.00	93.17
		2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	22,620,000.00	9,288,000.00	8,082,000.00	87.02
		3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	20,250,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	100.00
		2	Fasilitasi Kerjasama Daerah	89,977,100.00	44,985,000.00	42,415,519.00	94.29
		4	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	74,990,000.00	37,495,000.00	35,125,615.00	93.68
		5	Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	14,987,100.00	7,490,000.00	7,289,904.00	97.33
		3	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	9,400,208,700.00	9,927,623,100.00	9,666,470,681.00	97.37
		6	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	7,688,572,700.00	9,080,689,600.00	8,847,495,681.00	97.43
		7	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	88,636,000.00	21,390,000.00	7,100,000.00	33.19
		8	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	1,623,000,000.00	825,543,500.00	811,875,000.00	98.34
		4	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	424,475,400.00	309,459,000.00	190,757,872.00	61.64
		9	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	123,896,000.00	83,476,000.00	72,574,003.00	86.94
		10	Fasilitasi Bantuan Hukum	121,899,000.00	74,294,000.00	54,347,214.00	73.15
		11	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	178,680,400.00	151,689,000.00	63,836,655.00	42.08



Kode Sasaran	Sasaran	Program/Kegiatan/sub kegiatan	Input (Rp)						
			Target (DPA)	Target (DPPA)	Realisasi	%			
1	1	2	Meningkatnya Pelaksanaan Kualitas Kebijakan perekonomian dan pembangunan	2	Program Perekonomian dan Pembangunan	1,182,694,000.00	596,640,700.00	426,591,860.00	71.50
				5	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	214,706,000.00	133,147,200.00	67,577,743.00	50.75
				12	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	83,883,000.00	83,935,600.00	19,749,600.00	23.53
				13	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	97,323,000.00	44,711,600.00	43,628,143.00	97.58
				14	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	33,500,000.00	4,500,000.00	4,200,000.00	93.33
				6	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	77,549,500.00	63,066,800.00	53,811,500.00	85.32
				15	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	49,202,000.00	43,762,800.00	40,224,800.00	91.92
				16	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	28,347,500.00	19,304,000.00	13,586,700.00	70.38
				7	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	43,814,000.00	9,092,800.00	8,794,800.00	96.72
				17	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	16,282,000.00	-	-	-
				18	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	27,532,000.00	9,092,800.00	8,794,800.00	96.72
				8	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	846,624,500.00	391,333,900.00	296,407,817.00	75.74
				19	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	310,361,200.00	136,382,400.00	70,448,776.00	51.66
				20	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	249,071,800.00	152,602,400.00	152,290,385.00	99.80
21	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	287,191,500.00	102,349,100.00	73,668,656.00	71.98				
1	1	3	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum dan Akuntabilitas Kinerja	3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	35,659,027,892.00	27,626,093,665.00	25,372,840,727.00	91.84
				9	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	79,930,800.00	36,721,800.00	35,648,128.00	97.08
				22	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	79,930,800.00	36,721,800.00	35,648,128.00	97.08
				10	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20,410,140,292.00	16,948,762,715.00	15,547,655,863.00	91.73



Kode Sasaran	Sasaran	Program/Kegiatan/sub kegiatan	Input (Rp)			
			Target (DPA)	Target (DPPA)	Realisasi	%
		23 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20,342,294,992.00	16,911,603,615.00	15,517,559,988.00	91.76
		24 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	42,845,300.00	24,207,500.00	20,917,285.00	86.41
		25 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	25,000,000.00	12,951,600.00	9,178,590.00	70.87
		11 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	36,491,100.00	10,335,100.00	10,061,500.00	97.35
		26 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	36,491,100.00	10,335,100.00	10,061,500.00	97.35
		12 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	218,932,000.00	30,500,000.00	8,426,599.00	27.63
		27 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	34,932,000.00	-	-	-
		28 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	184,000,000.00	30,500,000.00	8,426,599.00	27.63
		13 Administrasi Umum Perangkat Daerah	2,087,723,800.00	1,204,364,300.00	1,163,160,672.00	96.58
		29 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	149,979,200.00	119,742,300.00	118,227,210.00	98.73
		30 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	716,222,600.00	366,827,000.00	348,836,275.00	95.10
		31 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	141,372,000.00	12,820,000.00	10,006,000.00	78.05
		32 Fasilitasi Kunjungan Tamu	80,150,000.00	4,975,000.00	4,975,000.00	100.00
		33 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1,000,000,000.00	700,000,000.00	681,116,187.00	97.30
		14 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	244,430,300.00	-	-	-
		34 Pengadaan Mebel	49,912,000.00	-	-	-
		35 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	194,518,300.00	-	-	-
		15 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4,440,937,900.00	4,100,155,500.00	3,786,028,645.00	92.34
		36 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1,003,060,000.00	845,570,000.00	785,962,478.00	92.95



Kode Sasaran	Sasaran	Program/Kegiatan/sub kegiatan	Input (Rp)			
			Target (DPA)	Target (DPPA)	Realisasi	%
		37 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	193,187,900.00	109,285,500.00	99,870,800.00	91.39
		38 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3,244,690,000.00	3,145,300,000.00	2,900,195,367.00	92.21
		16 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3,496,236,800.00	1,992,330,300.00	1,809,071,613.00	90.80
		39 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	533,430,000.00	457,590,000.00	351,787,150.00	76.88
		40 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1,745,486,800.00	1,017,485,300.00	966,512,825.00	94.99
		41 Pemeliharaan Mebel	20,000,000.00	11,200,000.00	10,128,800.00	90.44
		42 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	597,440,000.00	395,220,000.00	373,968,298.00	94.62
		43 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	599,880,000.00	110,835,000.00	106,674,540.00	96.25
		17 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1,222,600,600.00	1,187,031,250.00	1,047,725,005.00	88.26
		44 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	574,894,000.00	574,894,000.00	457,541,005.00	79.59
		45 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	207,706,600.00	172,137,250.00	163,902,500.00	95.22
		46 Pelaksanaan <i>Medical Check Up</i> Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	20,000,000.00	20,000,000.00	6,281,500.00	31.41
		47 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	420,000,000.00	420,000,000.00	420,000,000.00	100.00
		18 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	2,047,873,800.00	1,514,410,300.00	1,411,276,922.00	93.19
		48 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	265,337,500.00	274,207,700.00	236,670,214.00	86.31
		49 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	241,281,700.00	255,337,000.00	227,307,286.00	89.02



Kode Sasaran	Sasaran	Program/Kegiatan/sub kegiatan	Input (Rp)			
			Target (DPA)	Target (DPPA)	Realisasi	%
		50 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	1,541,254,600.00	984,865,600.00	947,299,422.00	96.19
		19 Penataan Organisasi	355,876,300.00	177,938,500.00	142,834,872.00	80.27
		51 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	85,593,800.00	39,616,000.00	33,362,345.00	84.21
		52 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	122,664,400.00	59,037,300.00	39,180,776.00	66.37
		53 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	98,283,200.00	41,679,800.00	36,520,180.00	87.62
		54 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	49,334,900.00	37,605,400.00	33,771,571.00	89.81
		20 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1,017,854,200.00	423,543,900.00	410,950,908.00	97.03
		55 Fasilitasi Keprotokolan	503,305,800.00	236,620,500.00	235,674,594.00	99.60
		56 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	322,513,300.00	109,799,200.00	105,640,243.00	96.21
		57 Pendokumentasian Tugas Pimpinan	192,035,100.00	77,124,200.00	69,636,071.00	90.29
3 SASARAN		3 Program, 20 Kegiatan, 57 Subkegiatan	46,992,709,492.00	38,621,850,465.00	35,808,175,273.00	92.71

Berdasarkan tabel diatas 3 (tiga) sasaran strategis yang ada pada Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur didukung oleh 3 Program, 20 Kegiatan dan 57 Subkegiatan.



Capaian Kinerja dan anggaran dari masing-masing kegiatan dan program untuk pencapaian sasaran strategis seperti tabel 3.12 berikut

Tabel 3.12
Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan
Sekretariat Daerah Kabupaten Belitong Timur Tahun 2025

No	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target		Realisasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi anggaran tahun 2025	
			Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja (%)	Anggaran (%)
1	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Kesejahteraan Rakyat	Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Sedang : 3.25	10,399,116,100.00	Sedang : 3.14	10,008,742,686.00	96.62%	96.25%
		Indeks Kualitas Kebijakan	50.1 (Cukup)		Sangat Baik (83.17)		166.01%	
	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kebijakan pemerintahan dan kerjasama yang difasilitasi (Persen)	100%	162,034,000.00	100%	151,514,133.00	100.00%	93.51%
		Persentase Kebijakan Pembinaan Keagamaan dan Kesejahteraan Rakyat yang difasilitasi (Persen)	100%	9,927,623,100.00	100%	9,666,470,681.00	100.00%	97.37%
		Persentase Regulasi yang disusun secara ideal, tepat fungsi dan tepat sasaran (%)	100%	309,459,000.00	100%	190,757,872.00	100.00%	61.64%
	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Administrasi Pemerintah Daerah (%)	100%	117,049,000.00	100%	109,098,614.00	100.00%	93.21%
		Penataan Administrasi Pemerintahan	*Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan (Dokumen)	3	98,761,000.00	3	92,016,614.00	100.00%



No	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target		Realisasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi anggaran tahun 2025		
			Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja (%)	Anggaran (%)	
		Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan (Dokumen)	1	9,288,000.00	1	8,082,000.00	100.00%	87.02%
		Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah (Dokumen)	1	9,000,000.00	1	9,000,000.00	100.00%	100.00%
		Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase fasilitasi dan Evaluasi pelaksanaan Kerjasama (%)	100%	44,985,000.00	100%	42,415,519.00	100.00%	94.29%
		Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri (Dokumen)	24	37,495,000.00	24	35,125,615.00	100.00%	93.68%
		Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	*Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama (Laporan)	1	7,490,000.00	1	7,289,904.00	100.00%	97.33%
		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Pembinaan Keagamaan dan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (%)	100%	9,927,623,100.00	100%	9,666,470,681.00	100.00%	97.37%
			Jumlah Pembinaan Keagamaan dan Kesejahteraan Rakyat yang difasilitasi (Kegiatan)						
		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual (Dokumen)	10	9,080,689,600.00	10	8,847,495,681.00	100.00%	97.43%



No	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target		Realisasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi anggaran tahun 2025		
			Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja (%)	Anggaran (%)	
		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	*Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB (Dokumen)	2	21,390,000.00	2	7,100,000.00	100.00%	33.19%
		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas (Dokumen)	3	825,543,500.00	3	811,875,000.00	100.00%	98.34%
		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Kebijakan Daerah yang ideal dan tidak tumpang tindih (%)	100%	309,459,000.00	90%	190,757,872.00	90.00%	61.64%
			Indeks Reformasi Hukum (Nilai)						
		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	*Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun (Dokumen)	800	83,476,000.00	886	72,574,003.00	110.75%	86.94%
		Fasilitasi Bantuan Hukum	*Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum (Kasus)	4	74,294,000.00	3	54,347,214.00	75.00%	73.15%



No	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target		Realisasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi anggaran tahun 2025		
			Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja (%)	Anggaran (%)	
		Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	*Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi (Dokumen)	800	151,689,000.00	886	63,836,655.00	110.75%	42.08%
2	Meningkatnya Pelaksanaan Kualitas Kebijakan perekonomian dan pembangunan	Indeks Tata Kelola Pengadaan		100%	596,640,700.00	100%	426,591,860.00	101.99%	71.50%
	Program Perekonomian dan Pembangunan	Presentase alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) (Persen)		-	-	-	-	0.00%	0.00%
		Persentase Peningkatan Kualitas Kebijakan terkait perekonomian administrasi pembangunan, dan sumber daya alam (%)		100%	205,306,800.00	100%	130,184,043.00	100.00%	63.41%
		Tingkat Kematangan UKPBJ (Level Proaktif)		9/9	391,333,900.00	9/9	296,407,817.00	100.00%	75.74%
		Persentase Indeks Tata kelola Pengadaan (Persen)							
	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Kebijakan Perekonomian yang dilaksanakan (%)		100%	133,147,200.00	100%	67,577,743.00	100.00%	50.75%



No	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target		Realisasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi anggaran tahun 2025		
			Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja (%)	Anggaran (%)	
		Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD (Dokumen)	4	83,935,600.00	4	19,749,600.00	100.00%	23.53%
		Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	*Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian (Laporan)	4	44,711,600.00	4	43,628,143.00	100.00%	97.58%
		Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	*Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil (Dokumen)	1	4,500,000.00	1	4,200,000.00	100.00%	93.33%
		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah Laporan Pengendalian Evaluasi Program dan Pengelolaan Evaluasi Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	4	63,066,800.00	4	53,811,500.00	100.00%	85.32%
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan						
		Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	*Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan (Laporan)	2	43,762,800.00	2	40,224,800.00	100.00%	91.92%
		Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	*Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	2	19,304,000.00	2	13,586,700.00	100.00%	70.38%
		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Pengawasan terhadap Bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan, Perikanan dan energi (Laporan)	4	9,092,800.00	4	8,794,800.00	100.00%	96.72%



No	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target		Realisasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi anggaran tahun 2025	
			Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja (%)	Anggaran (%)
		Jumlah Laporan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam (Laporan)						
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan (Dokumen)	2	9,092,800.00	2	8,794,800.00	100.00%	96.72%
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Pemenuhan dan Perbaikan/Peningkatan Variabel Kematangan UKPBJ (Laporan)	5	391,333,900.00	5	296,407,817.00	100.00%	75.74%
		Persentase Nilai Pemanfaatan Sistem Pengadaan						
		Persentase Kualifikasi dan Penataan Kompetensi PBJ						
		Persentase Tingkat Kematangan UKPBJ						
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)	1	136,382,400.00	1	70,448,776.00	100.00%	51.66%
	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	*Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Dokumen)	2	152,602,400.00	2	152,290,385.00	100.00%	99.80%
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa (Orang)	77	102,349,100.00	77	73,668,656.00	100.00%	71.98%



No	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target		Realisasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi anggaran tahun 2025		
			Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja (%)	Anggaran (%)	
3	Meningkatnya Pelaksanaan Kualitas Kebijakan perekonomian dan pembangunan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	71 (BB)	27,626,093,665.00	66.85 (B)	25,372,840,727.00	94.15%	91.84%	
		Indeks Kepuasan Masyarakat	79 (Baik)		85.65 (Baik)		108.42%		
		Indeks Kematangan Perangkat Daerah	37.75		39		103.31%		
		Indeks Profesionalisme ASN	8000%		80.64		100.80%		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	B (70)	36,721,800.00	B (66.85)	35,648,128.00	95.50%	97.08%	
		Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja (Persen)	100%	24,286,447,915.00	100	22,324,404,892.00	100.00%	91.92%	
		Indeks Kematangan Perangkat Daerah (Skor)	37.75	177,938,500.00	37.75	142,834,872.00	100.02%	80.27%	
		Kualitas Pelayanan Pimpinan aparatur Perangkat Daerah (Kategori)	Baik	3,124,985,450.00	Baik	2,869,952,835.00	100.00%	91.84%	
		Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (persen)							
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan kinerja yang disusun sesuai standar (Persen)	100%	36,721,800.00	100%	35,648,128.00	100.00%	97.08%
		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)							



No	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target		Realisasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi anggaran tahun 2025		
			Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja (%)	Anggaran (%)	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan perangka daerah (Dokumen)	13	36,721,800.00	13	35,648,128.00	100.00%	97.08%
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penatausahaan keuangan sesuai standar (Persen)	100%	16,948,762,715.00	100%	15,547,655,863.00	100.00%	91.73%
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	171	16,911,603,615.00	167	15,517,559,988.00	97.66%	91.76%
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	24	24,207,500.00	24	20,917,285.00	100.00%	86.41%
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	12,951,600.00	1	9,178,590.00	100.00%	70.87%
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase penatausahaan BMD sesuai standar (Persen)	100%	10,335,100.00	100%	10,061,500.00	100.00%	97.35%
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	7	10,335,100.00	7	10,061,500.00	100.00%	97.35%
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang memperoleh sertifikat pengembangan kompetensi (Persen)	100%	30,500,000.00	70%	8,426,599.00	70.00%	27.63%



No	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target		Realisasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi anggaran tahun 2025	
			Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja (%)	Anggaran (%)
		Persentase Peningkatan Kinerja dan Disiplin Aparatur (Persen)						
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2	30,500,000.00	1	8,426,599.00	50.00%	27.63%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah (Persen)	100%	1,204,364,300.00	97%	1,163,160,672.00	97.00%	96.58%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	119,742,300.00	12	118,227,210.00	100.00%	98.73%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	366,827,000.00	12	348,836,275.00	100.00%	95.10%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	12,820,000.00	12	10,006,000.00	100.00%	78.05%
	Fasilitas Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12	4,975,000.00	12	4,975,000.00	100.00%	100.00%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	700,000,000.00	12	681,116,187.00	100.00%	97.30%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan Jasa Penunjang Kantor (Persen)	100%	4,100,155,500.00	100%	3,786,028,645.00	100.00%	92.34%



No	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target		Realisasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi anggaran tahun 2025	
			Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja (%)	Anggaran (%)
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	845,570,000.00	12	785,962,478.00	100.00%	92.95%
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	109,285,500.00	12	99,870,800.00	100.00%	91.39%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	3,145,300,000.00	12	2,900,195,367.00	100.00%	92.21%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik (Persen)	100%	1,992,330,300.00	100%	1,809,071,613.00	100.00%	90.80%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	9	457,590,000.00	9	351,787,150.00	100.00%	76.88%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	99	1,017,485,300.00	90	966,512,825.00	90.91%	94.99%
	Pemeliharaan Mebel	*Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	140	11,200,000.00	140	10,128,800.00	100.00%	90.44%



No	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target		Realisasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi anggaran tahun 2025	
			Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja (%)	Anggaran (%)
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	765	395,220,000.00	765	373,968,298.00	100.00%	94.62%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3	110,835,000.00	3	106,674,540.00	100.00%	96.25%
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Persen)	100%	1,187,031,250.00	100%	1,047,725,005.00	100.00%	88.26%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	2	574,894,000.00	2	457,541,005.00	100.00%	79.59%
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	*Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	19	172,137,250.00	19	163,902,500.00	100.00%	95.22%
	Pelaksanaan <i>Medical Check Up</i> Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	*Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang)	2	20,000,000.00	1	6,281,500.00	50.00%	31.41%
	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	*Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	2	420,000,000.00	2	420,000,000.00	100.00%	100.00%



No	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target		Realisasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi anggaran tahun 2025	
			Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja (%)	Anggaran (%)
	Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah	Persentase Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Sekretariat Daerah (Persen)	100%	1,514,410,300.00	100%	1,411,276,922.00	100.00%	93.19%
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	*Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang disediakan (Paket)	12	274,207,700.00	12	236,670,214.00	100.00%	86.31%
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	*Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang disediakan (Paket)	12	255,337,000.00	12	227,307,286.00	100.00%	89.02%
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	*Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang disediakan (Paket)	12	984,865,600.00	12	947,299,422.00	100.00%	96.19%
	Penataan Organisasi	Persentase Penataan Organisasi (Persen)	100%	177,938,500.00	100%	142,834,872.00	100.00%	80.27%
	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	*Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Dokumen)	12	39,616,000.00	9	33,362,345.00	75.00%	84.21%
	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Laporan)	6	59,037,300.00	6	39,180,776.00	100.00%	66.37%
	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	*Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Dokumen)	2	41,679,800.00	2	36,520,180.00	100.00%	87.62%



No	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target		Realisasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi anggaran tahun 2025		
			Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja (%)	Anggaran (%)	
		Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	*Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Dokumen)	6	37,605,400.00	6	33,771,571.00	100.00%	89.81%
		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah agenda Protokoler, Komunikasi Pimpinan, Dokumentasi Kegiatan Pimpinan yang terfasilitasi (Agenda)	3300	423,543,900.00	3300	410,950,908.00	100.00%	97.03%
		Fasilitasi Keprotokolan	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan (Laporan)	1100	236,620,500.00	1100	235,674,594.00	100.00%	99.60%
		Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan (Laporan)	1100	109,799,200.00	1100	105,640,243.00	100.00%	96.21%
		Pendokumentasian Tugas Pimpinan	*Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan (Laporan)	1100	77,124,200.00	1100	69,636,071.00	100.00%	90.29%
				38,621,850,465.00		35,808,175,273.00	90.15%	92.71%	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM								Sangat Tinggi	Sangat Tinggi

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2025 telah mencukupi dan dapat dikatakan terjadi efisiensi. Hal ini bisa dilihat pada **Tabel 3.12** bahwa kinerja dan keuangan dari seluruh program mendapatkan predikat yang **sangat tinggi**. Penyerapan anggaran sebesar 92.71% dipengaruhi oleh hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan sasaran program yang tepat melalui perencanaan yang optimal memperlancar pelaksanaan aktivitas/program yang pada akhirnya berimplikasi pada idealnya penyerapan anggaran;
2. Proses pengadaan barang dan jasa melalui penyedia/swakelola secara efisien dan efektif serta tepat waktu mempermudah penyerapan anggaran;
3. Pengumpulan data dan informasi serta penyebarluasan produk dan dokumen kebijakan yang dilakukan melalui koordinasi dengan menggunakan teknologi informasi sehingga mempercepat proses penyerapan anggaran.

Meskipun demikian masih terdapat beberapa kendala dalam pencapaian kinerja dan keuangan diantaranya :

1. Belum optimalnya kinerja perencanaan, pengawasan serta pengendalian pelaksanaan kegiatan pada masing-masing Bagian di Sekretariat Daerah, sehingga banyak terdapat efisiensi;
2. Masih banyaknya perubahan penjabaran anggaran/pergeseran/rasionalisasi pagu anggaran sehingga menghambat proses pelaksanaan kegiatan, serta mempengaruhi capaian kinerja dikarenakan adanya perubahan target indikator dari awal penetapan rencana kerja.

Dari beberapa permasalahan kegiatan yang dihadapi, beberapa alternatif upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja yang telah dan akan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah sebagai faktor pendukung di tahun mendatang, diantaranya :

1. Meningkatkan pemahaman pada Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dalam menyusun perencanaan anggaran dan melaksanakan kegiatan yang diembannya;
2. Menyesuaikan proses perencanaan anggaran dengan kebutuhan sehingga dapat meminimalisir kesalahan dalam proses perencanaan anggaran;

3. Memaksimalkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada sehingga pelaksanaan kegiatan lebih optimal dan sesuai dengan target yang direncanakan;
4. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan tahapan yang sudah direncanakan;
5. Mengoptimalkan pelaksanaan mitoring dan evaluasi kegiatan di lingkup Sekretariat Daerah, sehingga dapat diketahui keberhasilan, kegagalan maupun keberlanjutan suatu kegiatan.



BAB IV PENUTUP

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik pada hakekatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip – prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.

Laporan Kinerja ini bukan hanya alat untuk mengukur kinerja, tetapi juga merupakan alat yang kuat untuk membentuk dan memengaruhi budaya organisasi. Laporan Kinerja sebagai alat untuk mendorong akuntabilitas, menciptakan budaya yang berorientasi pada pencapaian tujuan dan peningkatan berkelanjutan serta menciptakan budaya kolaborasi.

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 ini, dapat disimpulkan bahwa secara umum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang BAIK dan signifikan atas sasaran – sasaran strategis yang telah ditetapkan, sebagaimana tabel berikut :

Sasaran		Indikator Kinerja		Capaian Kinerja(%)
1	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Kesejahteraan Rakyat	1	Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	96.62%
		2	Indeks Kualitas Kebijakan	166.01%
2	Meningkatnya Pelaksanaan Kualitas Kebijakan perekonomian dan pembangunan	3	Indeks Tata Kelola Pengadaan	101.99%
3	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum dan Akuntabilitas Kinerja	4	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	94.15%
		5	Indeks Kepuasan Masyarakat	108.42%
		6	Indeks Kematangan Perangkat Daerah	103.31%
		7	Indeks Profesionalisme ASN	100.80%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa hampir seluruh capaian kinerja dari indikator sasaran yang ditetapkan pada Renstra 2025-2029 telah melampaui target sasaran,



meskipun masih terdapat beberapa capaian kinerja sasaran yang belum mampu mencapai target pada tahun 2025.

4.2 Rencana Aksi dan Upaya Perbaikan

Terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi focus perhatian dalam perbaikan kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mendukung ketercapaian visi dan misi, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan fungsi Sekretariat Daerah sebagai perumus kebijakan, koordinator pemerintahan, organisasi dan administrasi umum serta fungsi pendukung lainnya ;
2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program/ kegiatan sehingga dapat mendukung tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
3. Menguatkan komitmen pimpinan (Sekretaris Daerah) untuk mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodic dan memanfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagai dasar pemberian *reward and punishment*;
4. Secara internal perlu adanya peningkatan kualitas koordinasi antar Bagian sehingga dapat integrasi dan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran lingkup Sekretariat Daerah dapat terlaksana dengan optimal.

Sebagai upaya meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya, maka diharapkan bahwa Laporan Kinerja tahun 2025 ini dapat menjadi sumber informasi dalam pengambilan Keputusan guna peningkatan kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur

Manggar, 27 Februari 2026
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

ERNA KUNONDO, SH
NIP. 091104221997032002